

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI THAILAND STUDI KASUS
PEMBANTAIAN TAKBAI DI NARATIWAT THAILAND TAHUN 2004**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI THAILAND STUDI KASUS
PEMBANTAIAN TAKBAI DI NARATIWAT THAILAND TAHUN 2004**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



NIM : S20173093

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI THAILAND STUDI KASUS
PEMBANTAIAN TAKBAI DI NARATIWAT THAILAND TAHUN 2004**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Nurma Maerah

NIM : S20173093



Disetujui Pembimbing,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 198902062019031006

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI THAILAND STUDI KASUS
PEMBANTAIAN TAKBAI DI NARATIWAT THAILAND TAHUN 2004**

SKRIPSI

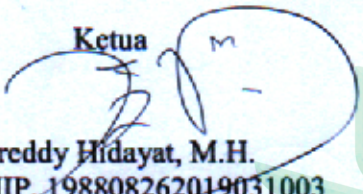
telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

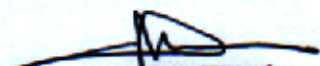
Tanggal : 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris



Ahmad Faris Wijdan, M.H.
NIP. 198811242023211014

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Nelson Mandela, Pengacara: politikus dari Afrika Selatan, 1918-2013

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga penyelesaian skripsi ini dapat tercapai. Doa dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. beserta keluarganya. Karya ilmiah ini didedikasikan untuk almamater tercinta, Fakultas Syariah Program Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan penuh cinta dan hormat, karya ilmiah ini disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung perjalanan hingga tahap ini, khususnya kepada:

1. Ibu tercinta (Mama Hameedah), perempuan hebat dalam hidup saya, terima kasih atas pengorbanan luar biasa Anda berupa waktu, tenaga, dan harta, serta kesabaran dan dukungan tanpa henti dalam mendidik saya dan memberikan motivasi, yang telah membantu saya menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Ayah (Ibrohim) dan suami (Aman) saya tercinta, terima kasih atas semangat dan motivasi yang terus Anda berikan kepada saya.
3. Keluarga besar dari pihak ibu, terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan, yang telah mendorong semangat saya hingga menyelesaikan skripsi ini.

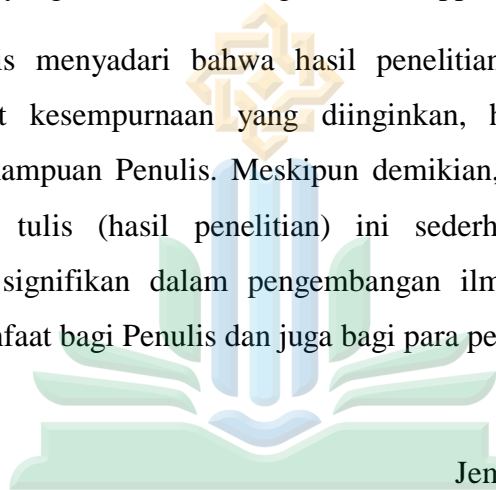
KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, saya masih diberikan karunia iman dan Islam hingga saat ini. Pertolongan dan kasih sayang-Nya sungguh besar, sehingga penulisan tesis berjudul “Penegakan Hak Asasi Manusia di Thailand: Analisis Kasus Pembantaian Takbai di Naratiwat, Thailand Tahun 2004” dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan umat beliau yang tetap istiqomah dalam menegakkan kalimatullah di bumi ini. Dalam penulisan tesis ini, saya mendapatkan dukungan, arahan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kuliah di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negara Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta para Pembantu Dekan dan stafnya.
3. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi demi terwujudnya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmu dan semangat yang diberikan dari awal perkuliahan hingga akhir.
5. Keluarga besar saya, yang telah memberikan doa dan dukungan.
6. Teman-teman angkatan Hukum Tata Negara 2017 yang selalu ada di saat senang maupun sedih. Terima kasih atas persahabatan yang tak akan pernah terlupakan dan dukungan serta semangat yang terus diberikan.
7. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Keluarga besar HTN2, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan persahabatan yang membantu saya menyelesaikan tesis ini.

9. Organisasi HMPI, terima kasih atas motivasi dan semangat yang diberikan, serta pengalaman yang luar biasa.
10. Sahabat-sahabat mahasiswa Patani (Girls IAIN 2017), terima kasih atas kasih sayang, canda tawa, dukungan, dan semangat yang telah mewarnai perjalanan penulisan tesis ini.
11. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta kepada semua yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi pemikiran, tenaga, dan materi. Jazakumullah khairan katsiran.
12. Semua pihak yang turut mendukung dan mensupport penulisan tesis ini.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan Penulis. Meskipun demikian, Penulis berharap bahwa meskipun karya tulis (hasil penelitian) ini sederhana, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan juga bagi para pembaca. Amin.



Jember, 27 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Nurma Maerah
J E M B E R NIM: S20173093

ABSTRAK

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI THAILAND STUDI KASUS PEMBANTAIAN TAKBAI DI NARATIWIAT THAILAND TAHUN 2004

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pembantaian Takbai, Thailand.

Latar Belakang ini akan memberikan gambaran ringkas tentang penelitian yang dilakukan terkait peristiwa pembantaian Tak Bai 2004 di Thailand. Penelitian ini memiliki fokus utama pada analisis hukum dan dampaknya terhadap hak asasi manusia serta penegakan hukum di Thailand.

Fokus pada perjuangan substansial, dan menekankan isu-isu yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mereka memperkuat kesadaran politik, memahami dan melestarikan budaya, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya budaya, termasuk warisan budaya dan agama, menjadi penting untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari berbagai komponen masyarakat.

Tujuan 1. Untuk mengetahui kondisi masyarakat Patani sebelum peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004.? 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004. ? 3. Untuk mengetahui penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Pembantaian Takbai Tahun 2004?

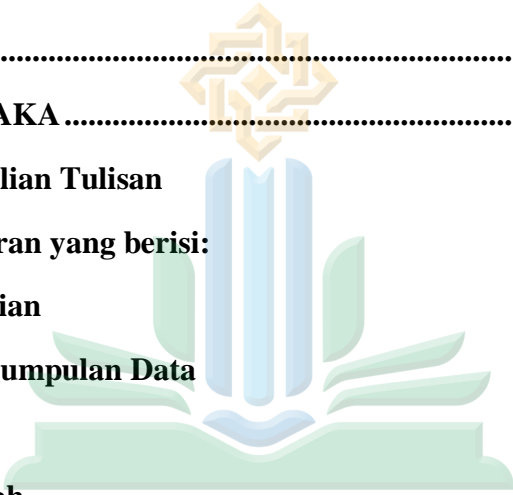
Metode Penelitian Yuridis Empiris, dengan pendekatan *sosio legal approach*. Melalui studi dokumen dan analisis kritis, penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks politik, sosial, dan hukum yang mengitari insiden tersebut. Terdapat pula penelitian lapangan untuk menganalisis respons pemerintah, penegakan hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pembantaian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum dalam menjamin keadilan bagi korban dan keluarga korban, serta kurangnya akuntabilitas pemerintah dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Implikasi politik dari peristiwa tersebut juga menjadi fokus utama, dengan penekanan pada perlunya reformasi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Thailand. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan diskusi tentang peradilan dan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memicu upaya nyata dalam memperbaiki sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Thailand, serta memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Istilah.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data	32

F. Keabsahan Data	33
G. Tahap-tahap Penelitian.....	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	35
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	35
B. Penyajian Data dan Analisis.....	38
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran yang berisi:	
1. Matrik Penelitian	
2. Formulir Pengumpulan Data	
3. Foto	
4. Gambar/Daerah	
5. Surat Keterangan (Izin penelitian dan lain-lain)	
Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Etnis dan kultur Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei, adalah kultur yang sama. Berdasar kultur di atas bangsa Melayu yang tersisa adalah penduduk di wilayah Patani Selatan Thailand. Orang Melayu selatan Thailand bertutur dengan bahasa Melayu sebagai bahasa Ibunda. Mereka Beragama Islam dan mempunyai identitas yang sama dengan orang Melayu umumnya.¹

Tinjauan historis, Kerajaan Melayu Patani berawal dari kerajaan Melayu Langkasuka. Mayoritas Sejarawan mengatakan terbentuk sebuah pemerintahan kesultanan Melayu yang paling lama adalah Melayu Langkasuka, hal ini tidak memragukan lagi bahawa kerajaan Melayu Langkasuka Patani pernah berdaulat dan menguasai kawasan yang luas hingga ke Ayuttaya di utara yaitu ibu kota Negeri Thailand dan menguasai kawasan selatan yang meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu.

Fakta Sejarah yang mengemukakan sebuah Negeri Melayu bernama Langkasuka yang terdapat dalam dokumen sejarah dan pengembara dari Negeri China dan dikuatkan lagi dengan catatan pengembara yang berasal dari Eropa dan tanah Arab. Sebuah catatan sejarah China yang menulis tentang pemerintah

¹ Ahmad Fathy al Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kedah: Perpustakaan Darussalam, 1994), 3

Kerajaan Langkasuka (502-566 M.) Pernah menyebut secara nyata terbuiktinya sebuah Negeri Melayu yang dinamakan Lang-ya-Shu dalam abad yang pertama. Dalam catatan sejarah kerajaan Liang yang ditulis pada awal abad ketujuh, terdapat nama Lang-ya-Shu atau Langkasuka sebagai sebuah yang mengirim perwakilan hubungan diplomatik dengan Raja China pada tahun 515, 531 dan 568 M. Sumber dari Barat juga ada menyebut tentang terbuiktinya ada sebuah Negeri Melayu di Semenanjung², pada zaman kebesaran kekaisaran Romawi dalam abad pertama dan kedua Masehi, dari tanah semenanjung inilah beberapa jenis barang mentah diimport untuk kegunaan Kerajaan Romawi pada masa itu.

Pada abad ke-6, Langkasuka dikatakan berada di bawah naungan Kerajaan Funan di utara, manakala pada abad ke-7 pula, ia berada di bawah naungan Kerajaan Melayu Sriwijaya Palembang dengan Kerajaan Sailendra di Jawa yang kekuasaannya meluas ke Campa, Langkasuka pada masa itu menjadi pusat pemerintah empayar ini di Semenanjung Melayu. Pada masa inilah juga bahasa Melayu Sanskrit berkembang dengan luas. Perlu dinyatakan bahwa pada zaman ini Langkasuka dapat dikenalkan sebagai sistem pemerintahan kesultanan, walaupun berada di bawah kekuasaan kerajaan yang lebih besar.

Kedatangan Islam di Patani menurut para sejarawan begitu banyak versi yang disumbangkan, bagaimana sebenarnya kedatangan Islam di Patani. Menurut pendapat tokoh sejarah setempat, agama Islam telah masuk ke Negeri Patani jauh lebih awal yaitu kira-kira pada abad ke-10 atau 11 M. Manakala agama Islam

² Mohd Zamberi A. Malek, *Uat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Kelantan: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), 2

hanya berdiri teguh menjelang akhir abad ke-15 dan awalnya abad ke-16 M. Susudah kejatuhun Kerajaan Islam Malaka, para saudagar Arab didakwa bertanggung jawab sebagai pendakwah islamisasi penduduk-penduduk Patani dan kemudian menguasai Istana Patani. Kenyataan sejarah menceritakan bahawa Raja dan Pembesar Patani memeluk agama Islam sekitar tahun 1457 M, sedangkan rakyat jelata sudah ada yang beragama Islam sejak 300 tahun sebelumnya.³

Tergambar pada abad ke-12 M sewaktu Langkasuka masih menjadi kerajaan. Hamka sendiri pernah menegaskan bahwa pada zaman Langkasuka terdapat ramai para saudagar Islam bermula kegiatan dakwah Islam di kalangan penduduk setempat, bukti-bukti argumentasi sejarah menunjukkan Islam muncul di Langkasuka dari Campa yang sudah memperteguhkan keunggulan Islam pada abad ke-11 dan 12 M seperti mana penemuan inskripsi Phanrang, ketika itu hubungan keluarga raja Langkasuka, Campa dan Patani mempunyai ikatan erat. Pada tahun 1150 M, sejarah Kelantan menceritakan mengenai kedatangan seorang Syeikh Arab dari Patani telah menyebarkan agama Islam di Kelantan. Kemudian penemuan kepingan uang pada tahun 577 H atau 1181 M sebagai menguatkan pernyataan tersebut, dan semakin menguatkan lagi islamisasi di peringkat awal ini. Penemuan inskripsi uang mas dinar di Patani pada tahun 1420 M yang mencatatkan nama Muhammad yang bisa menguatkan lagi kemunculan Islam di Patani⁴.

³ Mohd Zamberi A. Malek, *Uat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Kelatan: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), 2

⁴ Mohd Zamberi A. Malek, *Uat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Kelatan: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), 3

Dalam sumber lain yang berpendapat bahwasanya seorang ulama Pasai yaitu Syeikh Said yang telah mengislamkan Raja dan Para pembesar Patani secara langsung sebagai memenuhi janji-janji yang dibuat. Tidak menjadi kisah sebagai Mitos karena persamaan mazhab Shafi'i oleh masyarakat Islam di Pasai dan Patani adalah sebagai fakta yang mendukung argumentasi, kedatangan Islam juga telah membawa banyak perubahan dalam dimensi Aqidah, Pemikiran, Budaya, Bahasa, dan Sosial Politik masyarakat Islam Melayu Patani.

Pada tahun 1816, Kerajaan Thailand dari utara berhasil memainkan strategi politik untuk menguasai kerajaan dan bumi Melayu Patani. Menesuri kejadian ini bagaimana pemerintah Kerajaan Melayu Patani terbukti adanya sejak awal Masihi dibagi menjadi tujuh buah negeri masing-masing mempunyai rajanya sendiri Negeri-negeri tersebut adalah Patani, Nong Cik, Jalur atau Yala, Teluban atau Saiburi, Jering atau Jambu dan Legeh atau Rangae. Tahun demi tahun dengan kepintaran dan kekuatan, kerajaan Thailand mulai menaklukkan dengan menguasai negeri-negeri Melayu sebagai sebuah tanah jajahan, Akhirnya pada tahun 1902 M. Kerajaan Siam menghasilkan gantian dasar dari penjajahan kepada penaklukan dengan mengguling dan menghapuskan semua raja Negeri Melayu Patani.⁵

Pergerakan Patani Darussalam tidak pernah dirasakan terpisah dari umat Islam di rantau semenanjung Melayu, Wilayah yang pernah berkuasa selama 445 tahun (1456-1902) tiba-tiba dihapuskan dari peta dunia, sejarah panjang ini tidak akan mungkin dapat dilupakan dari momen umat Melayu Patani. Dimana

⁵ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Kelantan : Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), 2

mungkin sejarah kejatuhan patani Darussalam dari 1554 hingga 1661 dipadamkan begitu saja, Apakah lagi apabila patani Darussalam dianggap sebagai Mutiara Nusantara Melayu yang unggul dalam melahirkan basis ulama. ⁶

Tragedi Takbai yang terjadi pada tahun 2004 di Provinsi Narathiwat, Thailand, menandai suatu peristiwa berdarah yang memiliki dampak besar, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan politik di wilayah Thailand Selatan yang didominasi oleh mayoritas Muslim. Tragedi tersebut dipicu oleh penahanan enam anggota Tentara Keamanan Kampung (TKK) oleh aparat kepolisian Takbai, yang dituduh terlibat dalam pengambilan senjata oleh gerilyawan Patani.

Kejadian tersebut berakar pada konflik sejarah dan budaya antara pemerintah Thailand yang didominasi mayoritas non-Muslim dan masyarakat Muslim di wilayah selatan. Kebijakan nasionalisme yang memaksakan identitas dan integrasi nasional Thai kepada Melayu Muslim telah menciptakan ketegangan budaya dan resistensi yang kemudian berkembang menjadi konflik berskala besar, termanifestasi dalam bentuk demonstrasi damai yang kemudian berubah menjadi kekerasan.

Tragedi Takbai menjadi sorotan internasional karena dampaknya yang tragis, dengan sejumlah besar korban tewas dan luka-luka. Media pemerintah awalnya mencoba mengontrol narasi dengan mengumumkan angka korban yang jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh sumber independen. Perbedaan

⁶ Patani Darussalam, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2012/01/04/995/kila-dan-mimpinya-tentang-patani-darussalam.html> diakses 3 November 2023.

angka korban ini menimbulkan kecurigaan terhadap transparansi pemerintah dan menyulitkan upaya penyelidikan independen.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut akar penyebab dan dinamika konflik yang mengarah pada Tragedi Takbai. Fokus penelitian akan melibatkan analisis kebijakan pemerintah, ketidaksetaraan politik, dan peran gerakan Islam dalam eskalasi konflik di wilayah tersebut. Dengan memahami lebih dalam konteks sejarah, politik, dan sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peristiwa tragis ini dan mengidentifikasi potensi solusi yang dapat diusulkan untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di Thailand Selatan.⁷

Reaksi pemerintah terhadap insiden ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan masalah hak asasi manusia. Meskipun telah terjadi desakan internasional untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan mengadili pelaku kekerasan, banyak korban dan keluarga mereka tidak pernah mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.⁸ Tragedi Tak Bai menjadi peringatan yang menyedihkan tentang perlunya reformasi mendalam dalam sistem hukum Thailand, serta perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dan tegas. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tragedi ini menegaskan pentingnya mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang budaya. Ini juga menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah Thailand untuk mengambil

⁷ Peristiwa Berdarah Takbai, https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_berdarah_Tak_Bai diakses pada tanggal 3 November 2023.

⁸ Peristiwa Berdarah Takbai, https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_berdarah_Tak_Bai diakses pada tanggal 3 November 2023.

tindakan konkret dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif bagi semua warga negaranya, tanpa kecuali. Kesadaran global terhadap tragedi Tak Bai menjadi panggilan moral bagi komunitas internasional untuk berdiri bersama dan memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di tempat lain.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka ditemukan masalah penelitian beberapa peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004, dalam judul pembahasan “Peristiwa Pembantaian Takbai di Narathiwat Thailand Selatan Tahun 2004”

Untuk menjawab permasalahan tersebut di kemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana kondisi masyarakat Patani sebelum peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia atas Tragedi Takbai di Thailand Selatan?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi masyarakat Patani sebelum peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004.?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004. ?
3. Untuk mengetahui penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Pembantaian Takbai Tahun 2004?

4. Definisi Istilah

- Penegakan Hak Asasi Manusia

Penegakan yakni Melakukan upaya untuk memastikan keberadaan atau kelangsungan sesuatu, seperti organisasi atau hukum. Menjaga tegak atau lurus. Mempertahankan atau mengamankan sesuatu, seperti keadilan atau hukum. Memperkuat atau memantapkan sesuatu, seperti semangat atau keyakinan. Orang yang bertanggung jawab atas menegakkan atau mempertahankan sesuatu, seperti hukum atau keadilan. Dalam konteks tertentu, menegakkan bisa merujuk pada tindakan mendirikan sesuatu secara fisik atau abstrak, memastikan hal tersebut berada dalam posisi tegak atau terjaga. Menyuarakan atau mempertahankan pendapat atau keyakinan, terlepas dari perdebatan atau tantangan yang mungkin timbul. “Ibarat menegakkan benang basah” dapat diartikan sebagai melakukan tindakan yang tidak mungkin berhasil atau menyelesaikan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Dalam konteks hukum, penegak merujuk pada individu atau petugas

yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku.⁹

Hak asasi manusia hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat;¹⁰ Penegakan hak asasi manusia adalah proses melindungi, memajukan, dan menjamin hak-hak dasar setiap individu sesuai dengan standar internasional yang diakui secara universal. Hal ini melibatkan tindakan-tindakan konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental individu dipatuhi dan dihormati tanpa diskriminasi.

- **Tragedi Takbai**

Pada 25 Oktober 2004, terjadi peristiwa tragis yang dikenal sebagai Pembantaian Tak Bai di Provinsi Narathiwat, Thailand, yang menyisakan luka mendalam dalam sejarah dan masyarakat Thailand. Peristiwa ini bermula dari unjuk rasa damai yang diadakan oleh sekelompok besar demonstran Muslim untuk menuntut keadilan terhadap penangkapan sejumlah pria Muslim yang dituduh terlibat dalam aktivitas pemberontakan. Namun, apa

⁹ Penegakan, <https://typoonline.com/kbbi/penegakan>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

¹⁰ Hak Asasi Manusia, <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 3 November 2023.

yang seharusnya menjadi demonstrasi damai berubah menjadi tragedi yang mengerikan.¹¹

Otoritas Thailand menanggapi unjuk rasa tersebut dengan kekerasan yang tidak proporsional, yang menyebabkan konfrontasi antara demonstran dan aparat keamanan. Ratusan orang ditangkap dan dipaksa menaiki truk militer untuk diangkut ke kamp militer di luar kota. Namun, di dalam truk yang penuh sesak dan dalam kondisi cuaca yang ekstrem, banyak dari mereka mengalami kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Beberapa di antaranya meninggal karena kelelahan, dehidrasi, dan sesak napas.

Peristiwa Pembantaian Tak Bai mengekspos kegagalan sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia di Thailand. Respons pemerintah terhadap tragedi ini tidak memenuhi harapan, dengan kurangnya akuntabilitas dan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Selain itu, reaksi internasional yang keras terhadap kejadian tersebut menyoroti perlunya transparansi dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat di negara tersebut.

Tragedi Tak Bai tidak hanya menyisakan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam pada masyarakat Thailand, serta memunculkan pertanyaan serius tentang etika penegakan hukum dan hak asasi manusia di negara itu. Peristiwa ini menjadi peringatan penting tentang pentingnya menjaga kemanusiaan dan menghormati hak-hak

¹¹ Peristiwa Takbai, https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_berdarah_Tak_Bai diakses pada tanggal 3 November 2023.

dasar individu dalam situasi apapun, serta perlunya upaya konkret untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di masa depan.

5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuann penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian. Penulis caba membahas tingjauan dari historis Melayu Patani dalam berbagai aspek. Supaya bisa gambaran masa lampau penuh dengan fenomina-fenomina secara ringkas dan bisa petik dalam bahasan kali ini.

Bab II Penelitian Terdahulu dan Kajian Teoretis dan Konseptual.

Bab III Metode Penelitian dan Pendekatan penelitian.

Bab IV merupakan bab yang membahas mengenai historis Patani, kondisi sosial, politik, pendidikan, budaya, agama, dan ekonomi sebelum 2004. Sebagai pengantar pada peristiwa pembantaian Takbai 2004 oleh karena, penulis merasa sangat penting dalam memahami bagaimana bisa terjadi pembantaian tersebut, dengan beberapa kondisi yang mendorong pelaku pembantaian Takbai. Bab IV juga akan membahas mengenai peristiwa pembantaian Takbai 2004, kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi Konflik dan akhir mengenai respons masyarakat Melayu Patani terhadap peristiwa pembantaian Takbai.

Bab V merupakan Bab Penutup yang terdiri oleh hasil kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU SERTA KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Studi dan kajian terkait konflik di Thailand Selatan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti.

1. Wae-arsesah Dahayee, 2019, Yala Rajabhat University, *A Way Of Communication To Build Peaceful Coexistence In Multicultural Society In Southern Thailand.*

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dialek sebagai sarana komunikasi untuk membangun kehidupan berdampingan yang damai dalam masyarakat multikultural di bagian Selatan Thailand, termasuk bahasa Piten dan Jehae yang merupakan dialek dari provinsi Pattani. Kelompok sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemimpin dan warga desa dari kedua subdistrik Pithen, distrik Tungyangdang, provinsi Pattani, dan subdistrik Bangkhuntong, distrik Takbai, provinsi Narathiwat. Instrumen untuk pengumpulan data adalah kelompok fokus dan wawancara mendalam pada bulan Juni-Desember 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk kedua desa menganggap manfaat dan pentingnya dialek mereka sebagai sarana komunikasi di kalangan orang dewasa yang ingin mengembangkan

komunikasi dialek untuk membangun kehidupan berdampingan yang damai dalam masyarakat multikultural. Masalah dan keterbatasan penting dari komunikasi dialek adalah kurangnya pelestariannya. Sementara sebagian besar pengguna dialek adalah orang tua, remaja lebih suka berbicara bahasa Thai daripada dialek karena gerakan pendidikan, media pembelajaran baru yang sebagian besar menggunakan bahasa Thai, dan terlalu khusus dalam alamnya. Akibatnya, dialek tersebut mulai menghilang. Untuk pedoman pengembangan komunikasi dialek, pelestarian bahasa dialek seharusnya lebih didorong dan kesempatan akan diberikan baik bagi penduduk desa maupun non-penduduk desa untuk bersama-sama mempelajari dan menciptakan pemahaman bersama yang menghasilkan kehidupan berdampingan yang damai dalam masyarakat multikultural. Untuk mencapainya, pembelajaran dialek akan ditambahkan ke dalam kurikulum pengajaran dan pembelajaran atau mendirikan asosiasi pelestari dialek yang bekerja sama dengan sektor pemerintah dan swasta seperti lembaga pendidikan dan asosiasi lainnya.

2. Seminar tersebut diselenggarakan oleh Persekutuan Mahasiswa Wilayah Sempadan Thailand Selatan “Se-Patani” (PERMAS). Dalam Tema “Tragedi Derdarah Takbai 25 Oktober 2004”.

Kejadian peristiwa bembantain takbai menjadi fenomena yang populer di kalangan ahli sejarawan Patani dan Malaysia, fenomena tersebut juga dibahas di kalangan akademisi dengan melewati saminar-

saminar diberapa tempat, seperti yang mengadakan seminar di Prince of Songkhla University (Pattani), Minggu (9/12/2012). Sejarawan Malaysia juga ikut serta dalam memaparkan fenomena Pembantaian Takbai oleh Herry Nurdin, dalam judul buku, Perjuangan Muslim Patani Sejarah Panjang Penindasan dan Cita-cita Perdamaian, buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas peristiwa Takbai dalam perspektif kajian dengan menggunakan metode dan kausalitas atau di kenal sebagai deskriptif naratif yang belum ada penegakan hukum.¹² Harry Nurdin lebih membahas lebih kepada objektivitas peristiwa saja, tidak membahas secara subjektivitas. Justru penulis lebih jauh membahas dan mengkaji mengenai fenomena pembantaian Takbai dengan mengguna metode multi kausalitas, atau dapat dikenalkan sebagai deskriptif analisis, lebih kepada pendekatan teori disiplin ilmu, seperti pendekatan ilmu antropologi, politik, sosial, budaya, ekonomi sebagai mengantar fenomena dengan kompleks objektivitas dan subjektivitas.

3. Thanet Aphornasuvan membahas akar penyebab konflik di Thailand Selatan, menyoroti dampak kebijakan nasionalisme Thai yang memaksa identitas dan integrasi nasional pada Melayu Muslim, menyebabkan benturan budaya dan resistensi yang berujung pada kekerasan.
4. W.K. Che Man meneliti masalah serupa di Filipina Selatan dan Thailand Selatan, fokus pada dilema minoritas Muslim dalam hidup

¹²“Native America” <http://www.minorityrights.org/2615/unitedstates-of-america/nativeamericans.html>, diakses 8 November 2012

berdampingan dengan mayoritas non-Muslim dan mencari keseimbangan antara kepercayaan Islam dan kewarganegaraan penuh di negara mayoritas non-Muslim.


5. Neil J. Melvin memusatkan studinya pada eskalasi kekerasan di Thailand Selatan selama pemerintahan Thaksin Shinawatra, mengidentifikasi kesenjangan politik, ekonomi, dan peran antara minoritas Muslim dan mayoritas non-Muslim, serta dampak gerakan jihad Islam transnasional.
6. John Funston menggali sikap dan pendekatan Malaysia terhadap konflik di Thailand Selatan, mempertimbangkan hubungan geografis dan kultural antara kedua wilayah.
7. Chandranuj Mahakanjana menyelidiki dampak desentralisasi dan peran pemerintah lokal dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.¹³

Dengan ini penulis Skripsi yang berjudul Sejarah Pembantaian Takbai (Selatan Thailand) 25 Oktober 2004, dengan gaya menulis yang berbeda dengan penulis-penulis sebelumnya.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun, Asal	Judul Penelitian	Penemuan
1.	Thanet Aphornasuvan,	<i>“NationState and the Muslim Identity in the Southern Unrest and</i>	Studi ini berfokus pada akar penyebab konflik dan kekerasan di Thailand

¹³ Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, dan I William Zartman, *The Sage Handbook of Conflict Resolution* (London: SAGE Publication Ltd), 2009, hlm. 3.

		<p><i>Violence”</i></p> 	<p>Selatan. Tindakan pemerintah Thai/Siam dalam membangun nasionalisme modern Thailand melalui konsep nation-state dengan memaksa identitas dan integrasi nasional, termasuk bahasa, budaya, dan nilai-nilai budaya Thai, pada Melayu Muslim telah menimbulkan konflik budaya dan menghasilkan reaksi resistensi yang sangat kuat, yang pada akhirnya membawa dampak ke dalam bentuk kekerasan.</p>
2.	<p>Agidia Oktavia, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,</p>	<p>Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat di Thailand Selatan (Studi Kasus Tragedi Masjid Krue se dan Insiden Tak Bai)</p>	<p>Temuan penelitian bahwa tragedy Masjid Krue Se dan Insiden Tak Baik dipicu oleh kesalahan kebijakan yang dilakukan PM Thaksin Shinawatra.</p>
3.	<p>Wae-arsesah Dahayee,2019, Yala Rajabhat University,</p>	<p><i>A Way Of Communication To Build Peaceful Coexistence In Multicultural Society</i></p>	<p>penduduk kedua desa menganggap manfaat dan pentingnya dialek mereka sebagai sarana komunikasi di kalangan orang dewasa</p>

		<i>In Southern Thailand.</i>	yang ingin mengembangkan komunikasi dialek untuk membangun kehidupan berdampingan yang damai dalam masyarakat multikultural. Masalah dan keterbatasan penting dari komunikasi dialek adalah kurangnya pelestariannya.
4.	Persekutuan Mahasiswa Wilayah Sempadan Thailand Selatan "Se-Patani" (PERMAS).	"Tragedi Derdarah Takbai 25 Oktober 2004".	peristiwa Takbai dalam perspektif kajian dengan menggunakan metode dan kausalitas atau di kenal sebagai deskriptif naratif yang belum ada penegakan hukum

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Demokrasi

Thailand memiliki jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer.

Gerakan pro-demokrasi thailand yang dipimpin oleh para pemuda telah mendobrak tabu selama ini bahwa monarkir tidak bisa diguncang.

Tindakan pembangkangan terbaru mereka diserukan lewat sosial media. Saat ulang tahun raja pada Rabu (28/07) orang-orang biasanya secara tradisional mengenakan pakaian kuning. Namun, sebagai bentuk protes, demonstran mengenakan pakaian hitam. Pada puncaknya akhir tahun lalu, ratusan ribu pengunjung rasa gerakan pro-demokrasi Thailand menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, dan menginginkan monarki yang lebih transparan dan akuntabel.

"Protes tampaknya telah mereda untuk saat ini, tetapi saya yakin para pengunjung rasa telah mencapai tingkat yang luar biasa dalam hal membuat masalah reformasi monarki menjadi perhatian publik," ujar Pavin Chachavalpongpun, seorang akademisi Thailand dan kritikus terkemuka monarki yang tinggal di pengasingan di Jepang. kepada DW.

James Buchanan, seorang peneliti politik Thailand di City University of Hong Kong, yakin bahwa terciptanya diskusi publik tentang monarki adalah "perkembangan yang sangat besar."

"Pencapaian nyata dari gerakan ini adalah mendobrak tabu tentang mengkritik institusi dan mengatasi ketakutan akan undang-undang "lese majeste" alias regulasi penghinaan monarki yang melindunginya," Buchanan lebih lanjut.

Hukum "lese majeste" Thailand, atau Pasal 112, melindungi keluarga kerajaan dari kritik dan dapat menjerat orang dengan hukuman hingga 15 tahun penjara.

Mencabut undang-undang tersebut adalah salah satu tuntutan yang dilontarkan oleh para demonstran dalam manifesto 10 poin. Pengunjuk rasa juga menyerukan pengurangan kekuatan politik monarki, termasuk diakhirinya dukungan kerajaan atas kudeta dan pemotongan anggaran kerajaan yang sangat besar. "Membicarakan monarki sudah sulit. Tapi mendorong reformasi seperti ini lebih sulit lagi," kata Pavin.

Thailand adalah monarki konstitusional, dengan raja secara resmi berada di luar proses politik. Namun dalam kenyataannya, istana selama beberapa dekade memiliki pengaruh besar atas perkembangan di negara ini, dengan berulang kali bertujuan mengubah wacana politik dan mempertahankan kendali tertinggi.

Sejak tahun 1932 ketika monarki absolut dihapuskan, Thailand telah mengalami 13 kudeta yang berhasil, masing-masing dengan persetujuan raja. Setelah pemilihan umum yang disengketakan pada 2019, Maha Vajiralongkorn yang duduk di puncak tahta kekuasaan di Thailand, mendukung kabinet militer mantan pemimpin kudeta Prayuth.¹⁴

¹⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15

2. Teori Persamaan Hukum

Persamaan hukum adalah prinsip penting dalam negara hukum demokratis dan dijamin oleh konstitusi. Ini mencakup kesetaraan kedudukan dan posisi setiap warga di hadapan hukum, menjamin hak-hak sebagai warga negara, dan menghapuskan diskriminasi. Taat hukum, sebagai komitmen semua warga negara, melibatkan penghormatan terhadap hukum, sikap hati nurani, dan ketidakdiskriminan. Prinsip ini terkait dengan hubungan antara kekuasaan dan individu atau masyarakat.

Meskipun konstitusi menjamin persamaan di depan hukum untuk semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, kenyataannya masih ada ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Penyandang disabilitas sering dianggap tidak kompeten secara hukum karena kekurangan mereka. Prinsip persamaan hak menyatakan bahwa hak asasi manusia melarang segala bentuk diskriminasi, namun penyandang disabilitas masih menghadapi perlakuan diskriminatif.¹⁵

3. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut.

¹⁵ Marlindawati, Ulya Atsani, "Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqih Siyash Dusturiyah," *Jurnal intergrasi syari'ah*, Vol. 2, NO. 2 (Mei-Agustus 2021): 160.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka pembahasan dalam kajian ini akan dititikberatkan pada uraian tentang pengertian, HAM, sejarah HAM, perbedaan prinsipil antara pandangan Barat dan Islam tentang HAM, rumusan HAM menurut hukum Islam dan prinsippinsip HAM dalam hukum Islam.¹⁶

Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia Perserikataan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Baharuddin Lopa, kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab.” Penambahan istilah bertanggungjawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggungjawab atas segala yang dilakukannya. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung kepada manusia (hak-hak yang bersifat kodrati) oleh Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang

¹⁶ Hak Asasi Manusia, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Hak%20Asasi%20Manusia.pdf> diakses pada tanggal 3 November 2023.

melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada bulan September 2006, militer Thailand memberikan perlindungan konstitusional bagi kelompok transgender dalam Constitution of Kingdom of Thailand 2006. Setelah Dewan Keamanan Nasional menanggukkan hak konstitusi kelompok gay dan lesbian seperti Anjaree Foundation (organisasi hak lesbian pertama yang efektif di Thailand) dan Gay Political Group of Thailand yang mulai menawarkan Komite Drafting Konstitusi dan Majelis Perancang Konstitusi untuk menambahkan pembahasan mengenai perlindungan bagi warga transgender, gay dan lesbian. Sebuah proposal untuk menambahkan keragaman seksual. Kemudian pengakuan terhadap kelompok transgender dapat ditemukan dalam Pasal 5 Constitution of Kingdom of Thailand 2007 yang berbunyi sebagai berikut : “Thai people, irrespective of their origins, sexes or religions, shall enjoy equal protection under this Constitution”” Kalimat tersebut diatas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu :

“Orang-orang Thailand, terlepas dari asal-usul mereka, jenis kelamin atau agama, harus menikmati perlindungan yang sama di bawah Konstitusi ini”. Selain itu, pengakuan terhadap kelompok transgender juga terdapat dalam Pasal 30 Constitution of Kingdom of Thailand 2007 yang berbunyi sebagai berikut : ”Unjust discrimination against a person on the grounds of the difference in origin, race,

language, sex, age, disability, physical or health condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education or constitutionally political view, shall not be permitted”. Kalimat tersebut diatas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu : “Diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan dalam asal, ras, bahasa, jenis kelamin, usia, cacat, kondisi fisik atau kesehatan, status pribadi, berdiri ekonomi atau sosial, keyakinan agama, pendidikan atau melihat konstitusional politik, tidak diperkenankan”

Magna Carta Libertatum Inggris (1215), Sejarah mencatat bahwa Inggris memberikan perlindungan kepada para bangsawan dan keturunan mereka dengan tidak mengizinkan penahanan tanpa proses pengadilan. Perlindungan ini tidak diberikan tanpa alasan, melainkan sebagai pengakuan terhadap peran para bangsawan dalam pembiayaan kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pemerintah memberikan jaminan tersebut, yang dikenal sebagai Magna Carta Libertatum. Perjanjian ini dibuat pada masa pemerintahan Raja John pada tahun 1215 Masehi. Pada masa itu, para bangsawan meminta perlindungan karena banyak raja pada zaman tersebut bertindak sewenang-wenang dan membuat hukum sendiri, sementara raja sendiri dikebalikan terhadap hukum. Hampir semua aturan yang dibuat pada masa itu menguntungkan pihak kerajaan. Meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua orang,

yaitu hanya untuk para bangsawan, tidak dapat disangkal bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal dalam perkembangan HAM di dunia.¹⁷

Revolusi Amerika (Bagian dari Sejarah HAM 1776), Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan perlawanan rakyat Amerika terhadap penjajahan Inggris. Hasil dari revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menetapkan Hak Asasi Manusia melalui penyertaan aturan HAM ke dalam hukum negara. Hak Asasi Manusia di Amerika mengalami perkembangan yang lebih rumit daripada HAM di Inggris. Bahkan, HAM terus diperjuangkan hingga saat ini baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Revolusi Prancis (1789), Revolusi Prancis lebih terkenal daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika berperang melawan penjajah Inggris untuk mencapai kemerdekaan dan hak-hak mereka, Revolusi Prancis berbeda karena melibatkan perjuangan rakyat melawan raja mereka sendiri, yaitu Raja Louis XVI. Rakyat Prancis melakukan ini karena merasa bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap mereka dan memiliki kekuasaan mutlak. Revolusi Prancis menghasilkan aturan tentang hak-hak, termasuk hak atas kebebasan, hak atas kesetaraan, dan hak atas solidaritas.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “human rights,” sedangkan dalam bahasa Prancis disebut sebagai

¹⁷ Hak Asasi Manusia, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Hak%20Asasi%20Manusia.pdf> diakses pada tanggal 3 November 2023.

“droits de l'homme.” Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat padanya karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan pun, di mana pun, dan kepada siapa pun, sehingga bersifat universal. Prinsipnya, HAM tidak dapat dicabut atau dibagi-bagi, karena hak-hak tersebut saling terkait dan bergantung satu sama lain.¹⁸

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilihat sebagai "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Namun, ada juga yang menolak penggunaan unsur alamiah dan meyakini bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang muncul dari kebutuhan dan martabat manusia yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan pemerintahan.

Manusia merupakan representasi dari nilai-nilai yang disepakati dalam masyarakat. Ada pandangan yang menganggap Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan klaim dari kelompok yang tertindas. Namun, sebaliknya, terdapat juga kelompok yang meragukan eksistensi Hak Asasi Manusia dan menyatakan bahwa hak tersebut hanya muncul karena dipikirkan dan diperbincangkan oleh manusia. Dari perspektif hukum internasional, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan ini biasanya harus sesuai dengan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam

¹⁸ Hak Asasi Manusia, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Hak%20Asasi%20Manusia.pdf> diakses pada tanggal 3 November 2023.

konteks masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat yang mengancam "kehidupan bangsa," dan pecahnya perang pun tidak memenuhi syarat ini. Ketika terjadi perang, hukum kemanusiaan internasional ditegakkan sebagai aturan yang khusus. Meskipun demikian, beberapa hak tetap harus dihormati tanpa terkecuali, seperti hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan.

4. Integrasi dan Disintegrasi Bangsa (Nasional)

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional merujuk kepada seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya ekonomi, maka pada intinya integrasi nasional lebih menekankan persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian Integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Sedangkan disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa yang

mengakibatkan perpecahan. Secara umum penyebab disintegrasi bangsa adalah karena rasa tidak puas dan rasa ketidakadilan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan pemborantakan atau separatisme.¹⁹ Walaupun begitu, banyak faktor lain yang menyebabkan disintegrasi suatu bangsa seperti timbulnya perpecahan antar suku dan agama, konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan, perang saudara, dan lain-lain. Integrasi dan disintegrasi sangat tergantung pada kesanggupan negara dan pemerintah dalam memelihara komitmen dan isi kesepakatan bersama untuk hidup berbangsa dan bernegara. Kesepakatan ini tidak hanya dari penguasa, melainkan juga warga negara yang menginginkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, mengingat perwujudan integrasi dan disintegrasi suatu bangsa sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip ini (keadilan, jaminan kesejahteraan sosial, ekonomi, demokrasi, jaminan hukum, serta jaminan HAM).

5. Agama sebagai Faktor Integratif dan Disintegratif

Agama, sebagai sistem kepercayaan, memiliki dualitas positif dan negatif dalam pengaruhnya terhadap masyarakat. Menurut perintis sosiologi, agama adalah sistem terpadu yang menggabungkan kepercayaan dan praktik terkait dengan hal yang suci, membentuk komunitas moral yang disebut umat. Dalam aspek positifnya, agama berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat, baik secara mikro

¹⁹ "Minority language" http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_language (diakses 8 November 2012).

maupun makro, dengan memberikan integritas dan memperkuat persatuan melalui upacara keagamaan. Di sisi negatif, agama dapat memicu disintegrasi bangsa, terutama jika terjadi konflik atau pertentangan yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

Definisi minoritas bervariasi, tetapi secara umum, minoritas merujuk pada kelompok sosial dengan jumlah anggota yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok lain di masyarakat, dan mereka biasanya mengalami diskriminasi. Minoritas dapat didefinisikan berdasarkan kriteria sosial, termasuk ketidakuntungan akibat diskriminasi, solidaritas kelompok, dan isolasi sosial. Ukuran kuantitatif tidak selalu menjadi standar tunggal dalam menentukan minoritas; elemen-elemen kualitatif juga diperhatikan.

Pandangan perspektif Islam terhadap minoritas mencakup dua jenis, yaitu minoritas muslim pribumi dan minoritas muslim imigran. Sejarah awal Islam mencatat pengalaman umat Islam sebagai minoritas di Mekah dan Madinah, yang kemudian berkembang menjadi mayoritas. Meskipun globalisasi dan migrasi telah mengubah dinamika ini, umat Islam kadang-kadang masih menjadi minoritas di beberapa wilayah. Perspektif Islam juga menekankan pentingnya kajian fikih minoritas untuk memberikan panduan hukum Islam bagi umat Islam yang tinggal sebagai minoritas. Fikih ini mengeksplorasi situasi di mana umat Islam menjadi minoritas, menghadirkan kerangka kerja hukum yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks ketidakberdayaan

atau kondisi darurat. Selain itu, fikih minoritas diharapkan dapat mendorong sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di antara masyarakat..²⁰

Jabir menulis sejumlah tulisan, salah satunya berkenaan dengan fiqh al-aqalliyat, yaitu *Nazharat Ta'sisiyat fi fiqh al-aqalliyat* dan *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Refections*. Sementara Yusuf al-Qardlawi mendirikan European Council for Fatwa and Research (ECFR) di London pada tahun 1997 dengan tujuan utama memberikan layanan hukum Islam pada masyarakat minoritas muslim di Eropa. Untuk itulah dia menulis buku khusus berjudul *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat, Hayat al-muslimin Wasatal-Mujtama` tal-Ukhra* Dalam konteks ini ada sejumlah catatan penting yang patut disampaikan.²¹

Pertama, fikih minoritas menjadi usaha mewujudkan eksibilitas hukum Islam saat Muslim menjadi minoritas di suatu negara, atau saat mereka berada di negara yang dasar negaranya bukan Islam. Dalam konteks sosial politik, fiqh al-aqalliyat, adalah fikih orang yang tak berdaya. Dalam kondisi ketidakberdayaan tersebut, pokok bahasannya antara lain misalnya terkait hukum konsumsi daging hewan yang penyembelihannya berkemungkinan tanpa membaca basmalah, hukum bekerja di café atau restoran yang menjual minuman keras, hukum

²⁰ Will Kymlicka dan Baogang He, ed., *Multiculturalism in Asia*, (New York: Oxford University Press, 2005).

²¹ Bert Klendermens, "Transient Identities? Memberships Pattern in the Dutch Peace Movement," dalam Enrique Larana et. al., ed. *New Social Movements from Ideology to Identity*, (Philadelphia: Temple University Press, 1994), 168-170.

mengucapkan salam pada non-muslim, memilih pemimpin dari kalangan non-muslim, dan lain sebagainya. Kedua, fikih minoritas dengan cara berpikir seperti ini cenderung diposisikan sebagai “langkah darurat” dari kondisi yang dipandang

Ernesto Laclau menunjukkan bahwa bahkan perbedaan antara identitas partikular seperti identitas budaya lokal dan agama dengan identitas universal bukan tidak mungkin terjadi suatu titik temu. Dengan optimistis Laclau menunjukkan bahwa tercapainya titik temu partikularitas dan universalitas seperti ini merupakan suatu capaian demokrasi yang lebih tinggi. Sementara itu, terkait agama yang dapat menjadi faktor penting untuk memperkuat identitas politik dan kultural, Scott Appleby menunjukkan adanya dua dimensi agama.²²

Yaitu bahwa “agama bisa menjadi faktor dalam konflik dan kekerasan namun juga bisa menjadi faktor bagi transformasi konflik dan kekerasan menjadi perdamaian dan rekonsiliasi”. Argumen yang disampaikan Appleby antara lain adalah bahwa di kalangan pemimpin dan pemikir agama itu sendiri perbedaan pandangan dan pendapat terus terpelihara sehingga gagasan-gagasan mengenai peran agama sebagai faktor transformasi akan terus lestari. Disamping itu, gerakan agama di beberapa tempat kenyataannya juga diinisiasi oleh LSM selain para pemimpin agama, terutama terkait gerakan hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan termasuk hak-hak budaya lokal di dalam kelompok agama itu sendiri.

Pada kondisi seperti inilah agama menjadi faktor dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian. Amy Gutmann mengatakan: “Identitas yang berbasis agama tidak selalu bertentangan dengan demokrasi. Keduanya setidaknya bertemu dalam komitmen

²² Ernesto Laclau, “Introduction” dalam *The Making of Political Identities*, (New York: Verso, 1994), 1-5.

penghargaan terhadap individu. Baik agama maupun demokrasi memiliki komitmen penghormatan terhadap individu sehingga memungkinkan terjadinya titik temu keduanya.” Dari sini Gutmann membangun optimisme bahwa pertemuan dua dasar ini justru akan memperkokoh terbangunnya keadilan dan jaminan individu yang lebih kokoh. Kritik sebagian orang bahwa agama cenderung akan membangun tirani, oleh Gutmann dijawab bahwa tidak hanya agama yang berpotensi.²³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²³ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence, and Reconciliation*, (New York: Rowman & Little eld Publishers Inc., 2000), 281-307.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu mekanisme untuk melakukan sesuatu dengan hati-hati dan berpikir secara cermat demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, metode digunakan sebagai sarana kajian ilmiah untuk pengumpulan data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi secara metodis dan sistematis. Sistematisitas penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara terencana dan bertahap, sedangkan metodologi berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten tanpa kontradiksi dalam suatu kerangka. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang melakukan penelitian secara teratur dan sistematis untuk mendapatkan hasil berupa penemuan ilmiah seperti produk, proses, atau analisis dan argumentasi ilmiah baru. Bagian ini membahas asumsi atau fakta mendasar yang dianggap benar tanpa verifikasi, khususnya dalam aspek-aspek tertentu yang berfungsi sebagai kerangka refleksi. Penelitian yang terorganisasi dengan baik memerlukan metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode berfungsi sebagai sarana untuk memecahkan suatu masalah tertentu dan memberikan hasil yang tepat, fokus, dan baik.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistem, dan penalaran. Tujuannya adalah untuk meneliti dan mengkaji satu atau lebih fenomena hukum secara analisis. Penelitian ini juga melibatkan pengkajian menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum

guna menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena yang sedang diteliti.²⁴

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal, yang merupakan metode analisis untuk menghasilkan data deskriptif analitis, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku aktual yang dilaporkan oleh peneliti secara keseluruhan. Pendekatan kualitatif melibatkan mekanisme penelitian berdasarkan uraian deskriptif dalam kata-kata atau frase yang disusun secara cermat dan sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi dan pelaporan hasil penelitian. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagai "penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer." Penelitian empiris bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai tingkah laku aktual dalam masyarakat yang tidak tertulis, dialami dalam kehidupan bermasyarakat. Data primer dihasilkan langsung dari lapangan, mencakup fakta-fakta dalam masyarakat, badan hukum, atau organisasi pemerintahan. Penelitian hukum empiris dalam konteks ini menjadi dasar untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang ada di masyarakat, dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku sebagai landasan dasar perilaku masyarakat.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 43.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 129.

2. Lokasi Penelitian

Tragedi Tak Bai terjadi pada 25 Oktober 2004 di Tak Bai, sebuah kota kecil di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan. Insiden ini berkaitan dengan konflik antara kelompok separatis Muslim dan pemerintah Thailand yang mayoritas non-Muslim.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian membahas terkait sumber data yang ada dalam penelitian kualitatif merupakan perkataan, tindakan, dan selebihnya merupakan data pelengkap seperti dokumen dan sejenisnya. Subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Keluarga Tragedi Tak Bai Thailand
2. Tokoh Masyarakat Thailand

4. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, seperti narasumber. Data ini bersifat spesifik karena diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.
- Data sekunder, sebaliknya, berasal dari bahan pustaka seperti buku, dokumen, dan publikasi lain yang relevan dengan penelitian. Biasanya, bahan sekunder berupa bukti seperti catatan sejarah atau laporan yang sudah disusun dan diterbitkan.

Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- Bahan Hukum Primer: Dokumen hukum tetap, seperti peraturan perundang-undangan dan naskah resmi, menjadi fokus utama. Beberapa bahan hukum yang digunakan mencakup Konstitusi Thailand 1997, Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penyelesaian Konflik 2011, Undang-Undang Anti-Penyiksaan 2007, dan Undang-Undang Mengenai Kebebasan Pers dan Pemberitaan 2007.
- Bahan Hukum Sekunder: Bahan ini berfungsi sebagai penguat dan pendukung bahan hukum utama. Buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan sosial, temuan penelitian, makalah, artikel, karya tulis ilmiah, dan informasi dari internet digunakan untuk analisis dan kajian mendalam.
- Bahan Hukum Tersier: Bahan ini berperan sebagai petunjuk dan hasil kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menguraikan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai setiap teknik dan jenis data yang diperoleh. Metode penelitian ini mencakup:

Wawancara: Wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur adalah tiga jenis wawancara yang digunakan. Pilihan pada wawancara semi-terstruktur membuka kesempatan informan untuk menyampaikan pendapat lebih bebas. Instrumen digunakan sebagai pedoman, tetapi wawancara tetap mandiri untuk memungkinkan informan berbicara lebih terbuka.

Dokumentasi: Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari buku, catatan, dokumen, angka-angka tertulis, dan gambar yang dianggap sebagai pendukung penelitian. Bahan dokumentasi dapat berupa artikel yang mendukung hasil penelitian.

Studi Kepustakaan (Library Research): Studi kepustakaan melibatkan pengkajian buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan laporan terkait topik penelitian, khususnya terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

6. Analisis Data:

Analisis data dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian dengan melibatkan pengorganisasian, pengolahan, pemecahan, sintesis, serta mencari pola dan isu-isu penting.

Keabsahan Data: Pengecekan kredibilitas dilakukan dengan teknik validasi data, termasuk teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik triangulasi sumber menggunakan wawancara sebagai metode yang sama untuk menguji keabsahan data dari berbagai sumber. Triangulasi teknik melibatkan penggunaan metode berbeda, seperti observasi dan dokumentasi, untuk memvalidasi data. Triangulasi waktu adalah

pemeriksaan acak pada waktu dan situasi yang berbeda untuk memastikan keabsahan data.

7. Tahap-tahap Penelitian:

Tahap Pra Penelitian Lapangan: Penyusunan rencana penelitian, pemilihan wilayah penelitian, asesmen lapangan, dan pemilihan informan. Pengurusan perijinan penelitian dan persiapan peralatan penelitian.

- Tahap Pekerjaan Lapangan: Observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk merekam fenomena yang terjadi.
- Tahap Analisis Data: Pengelolaan data dari berbagai sumber untuk menyusun kesimpulan yang akan dimasukkan ke dalam laporan penelitian.
- Tahap Penyelesaian: Verifikasi hasil penelitian agar dapat dipercaya dan valid sebelum disajikan dalam karya ilmiah.

Penelitian ini mencakup langkah-langkah sistematis dari perencanaan hingga penyajian hasil dalam sebuah karya ilmiah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Negara Thailand, tepatnya Thailand Selatan 25 Oktober, menjadi hari yang tidak pernah bisa dilupakan oleh kaum Muslimin Patani, Thailand. Pada tanggal itu, tepatnya 25 Oktober 2004, terjadi peristiwa pembantaian umat Islam di Takbai, Patani, Thailand Selatan. Peristiwa ini terjadi di depan kantor polisi Daerah Tak Bai, Wilayah Narathiwat. Sejumlah demonstran dilaporkan meninggal dalam truk tentara, sebuah insiden yang memicu pemberontakan dan tetap menjadi lambang impunitas negara. Sudah 15 tahun lalu peristiwa yang disebut media sebagai ‘Tragedi Tak Bai’ itu terjadi. Muslim di selatan Thailand pun pada Jumat kemarin (25/10) memperingati kejadian itu dengan memanjatkan doa untuk mereka yang telah meninggal dalam insiden itu.²⁶

Lokasi kejadian Tak Bai, Thailand, adalah di Provinsi Narathiwat, yang merupakan salah satu dari tiga provinsi di wilayah Selatan Thailand yang sering mengalami konflik. Narathiwat, bersama dengan Pattani, Yala, dan beberapa wilayah lainnya, telah menjadi pusat perhatian karena gejolak sosial dan politik yang terkait dengan sejarah, identitas budaya, dan masalah agama yang kompleks.

Tak Bai sendiri merupakan sebuah distrik di Provinsi Narathiwat, yang terletak di sebelah barat daya kota Narathiwat. Wilayah ini dikenal karena peristiwa tragis pada 25 Oktober 2004, yang dikenal sebagai Pembantaian Tak Bai, di mana ratusan demonstran Muslim ditahan oleh pasukan keamanan

²⁶ Tak Bai, https://ms.wikipedia.org/wiki/Tak_Bai diakses pada tanggal 3 November 2023.

Thailand dan kemudian diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi. Kejadian ini telah menimbulkan perhatian internasional terhadap situasi hak asasi manusia di Thailand dan meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam di masyarakat setempat.²⁷

Dalam konteks penelitian yang berfokus pada kejadian Tak Bai, lokasi tersebut menjadi pusat perhatian untuk memahami dinamika sosial, politik, dan budaya di wilayah tersebut. Penelitian terkait Tak Bai berusaha untuk menggali akar penyebab konflik, mengevaluasi respons pemerintah, dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk membangun perdamaian dan kerukunan di masyarakat multikultural yang kompleks di Selatan Thailand.²⁸



Struktur masyarakat di Tak Bai, Thailand, mencerminkan keanekaragaman sosial, budaya, dan agama yang khas bagi wilayah Selatan Thailand. Meskipun sulit untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur masyarakat di Tak

²⁷ Tak Bai, https://ms.wikipedia.org/wiki/Tak_Bai diakses pada tanggal 3 November 2023.

²⁸ Tak Bai, https://ms.wikipedia.org/wiki/Tak_Bai diakses pada tanggal 3 November 2023.

Bai secara spesifik, terdapat beberapa komponen umum yang mungkin terdapat dalam komunitas tersebut.²⁹

- Masyarakat Muslim: Mayoritas penduduk di Tak Bai adalah umat Muslim, yang menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Agama Islam memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, adat istiadat, dan sistem nilai di masyarakat Tak Bai.
- Keluarga dan Kekerabatan: Struktur keluarga dan kekerabatan di masyarakat Tak Bai umumnya didasarkan pada sistem patriarki, di mana lelaki memegang peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kekerabatan erat dan penting dalam memelihara kerukunan dan solidaritas antarindividu dan kelompok di masyarakat.
- Pemerintahan dan Kepemimpinan Lokal: Terdapat struktur pemerintahan lokal yang membantu mengatur kehidupan sosial dan politik di Tak Bai. Kepemimpinan lokal, seperti kepala desa atau pemimpin komunitas, memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kegiatan masyarakat dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam komunitas.
- Penghidupan dan Ekonomi: Sebagian besar masyarakat Tak Bai menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri lokal. Pertanian, termasuk perkebunan karet, dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk di wilayah tersebut.

²⁹ Tak Bai, https://ms.wikipedia.org/wiki/Tak_Bai diakses pada tanggal 3 November 2023.

- Budaya dan Tradisi Lokal: Masyarakat Tak Bai memiliki warisan budaya dan tradisi yang kaya, termasuk kesenian, musik, tarian, dan kegiatan budaya lainnya yang mencerminkan identitas unik mereka. Tradisi-tradisi lokal ini sering kali menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memainkan peran penting dalam memelihara identitas dan solidaritas komunitas.

Struktur masyarakat di Tak Bai terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Thailand. Masyarakat yang multikultural ini terus beradaptasi dengan tantangan dan perubahan global sambil mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang telah menjadi bagian integral dari identitas mereka.

B. Data Analisis

1. Faktor Penyebab Munculnya Peristiwa Pembantaian Takbai Tahun 2004

a. Peristiwa Demonstrasi Pattani Disebabkan Pembantaian Di Jembatan Koto pada Tahun 1975

Pada tanggal 29 November tahun 1975 terjadi pembantaian di Jembatan Koto terdapat 5 (lima) korban meninggal kejadian tersebut terjadi di Daerah Saiburi (Teluban), Provinsi Pattani. Korban asal dari masyarakat Muslim Patani. Peristiwa pembantaian Jembatan Koto 29 September 1975, berawal dari Saudara Harun Brasek, Samael Paya, Samael Isa, Useng Kakak, Beraheng Brasek dan Sudara Semea Brasek yang baru berusia 14 tahun. Mereka berangkat pulang dari provinsi Narathiwat menuju rumah yang terletak

Kampong Utea Berangea , tiba- tiba di tangkap oleh Tentara Darat(AD) Thailand devisi operasi, setelah itu di masukan ke dalam Truk Tentera langsung pergi, tiba-tiba berlangsung di Jembatan Koto. Kemudian ditusuk dengan pisau sehingga tidak dapat metahan, 5 (lima) langsung tewas dan 1 (satu) cendera.³⁰

Setelah kejadian itu tidak berapa lama para demonstiran di daerah Saiburi berkumpul, pertama pedemonstrasi berkumpul dengan tujuan menuntut hak korban yang tak bersalah itu, sementara bantuan dari para demonstrasi asal kalangan mahasiswa Bangkok dikenali dengan (kumpulan selatan). Pada tanggal 11 Desember 1975 di Kantor Provinsi Patani penuh dengan para demonstrasi, demikian mereka mulai bergerak, menuntut hak kepada pemerintah dengan ajuan tuntutan. Permintaan pertama. Supaya pemerintah secepat menarik Tentara yang ada di daerah Bachok Provinsi Narathiwat dan tanggung jawab atas kerugian nyawa korban dan cendera.

Pada tanggal 14 Desember 1975 sekitar pukul 20.45 tersangka penjahat (seorang yang tidak di ketahui namanya, para demonstrasi menganggap sebagai intelejen Tentara Pemerintah Thai berpura-pura masuk bergabung dengan para demonstrasi) sementara melempar sebuah Bom ke arah para demonstrasi yang sedang ramai berkumpul di Kantor Provinsi Pattani. Bom tersebut meledak dan mengakibatkan 12 orang meninggal dan 40 orang cendera dan luku-luka. Kondisi semakin parah tidak berapa lama Ustaz Muhammad yang sedang azan di atas panggung, tiba-tiba di tembok oleh siapa

³⁰ Lembaga pembangunan daerah yala, <http://www.yalapao.go.th/main/content.php> 7 Juli 2013.

yang tidak mengetahui identitasnya kemudian Ustaz Muhammad akhirnya meninggal berapa saat demikian.³¹

Kejadian ini dapat di simpulkan bahwa korban dalam peristiwa pembantaian demonstrasi di Patani 1975 M. terdapat sebanyak 13 orang meninggal sementara namanya akan di selaskan sebagai berikut:

1. Guru Ismaae Weadolah (Provinsi Patani),
2. Thamanu Makrosek (Provinsi Narathiwat),
3. Hasbulah Tokyeng (Provinsi Yala),
4. Sauda Haru Muhammad (Provinsi Yala),
5. Abdulhamid Chemak (Provinsi Yala),
6. Meuli Kharamuso (Provinsi Patani),
7. Weahamad Chekheng (Provinsi Patani),
8. Ustaz Mamud Deamali (Provinsi Patani),
9. Makhta Baka (Provinsi Patani),
10. Asea Haywe Mamad (Provinsi Patani),
11. Namat Musodee (Provinsi Patani),
12. Tidak tahu namanya,
13. Tidak mengetahui namanya.

b. Konflik diantara Aparat Keamanan Negara dengan Kondensasi Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani pada Tahun 2001. Sejak Thaksin Chinawat menjabat sebagai Perdana Menteri, setelah

Pemilihan umum pada bulan Febuari 2001. Perdana Menteri Thaksin Chinawat segera perubahan kebijakan politik dan administrasi birokrasi

³¹ Pusat pelayanan infomasi, <http://www.osmsouth-border.go.th/provinces/detail/20/> , 7 Juli 2013

pemerintah, di bagian kelima perbatasan Provinsi Thailand Selatan. Justru, kekerasan masih terusan berlaku, malahan semakin parah setiap hari, namun berubah disektor aparat pertahanan dan keamanan daerah operasi yang di pertanggung jawab oleh bagian aparat provinsi perbatasan Thailand Selatan, tidak dapat mengurangi korban konflik. Peristiwa keganasan setelah Thaksin Chinawat jabat sebagai Perdana Menteri.³²

Pada tanggal 7 April 2001 peristiwa letupan bom di Stasiun Hatyai Provinsi Songkhla, mengakibatkan korban luka, dan pada tanggal 28 April 2003 peristiwa serangan senjata, pengeboman dan pembunuhan terhadap aparat keamanan pemerintah di bagian provinsi perbatasan Thailand Selatan, penyerangan dan perampasan di markas militer divisi 12 daerah Sukhirin provinsi Narathiwat, 5 aparat keamanan meninggal, di ikuti oleh peristiwa perampasan senjata markas militer divisi lima daerah Thanto provinsi Yala, hanya dapat luku-luka saja.

Konflik tersebut bukan hanya serangan pada pihak aparat keamanan saja, bahkan konflik melebar kesasaran aparat birokrasi pemerintah dan berterusan melaku serangan terhadap aparat-aparat tertinggi, sehingga sering kali terjadi perubahan disektor birokrasi pemerintah, sementara kebijakan pemerintah bekal- kali mengganti para pemimpin di kalangan aparat-aparat tertinggi untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik di bagian provinsi perbatasan Thailand Selatan.

³² Pusat pelayanan infomasi, <http://www.osmsouth-border.go.th/provinces/detail/20/> 7 Juli 2023

c. Solusi Konflik Patani Pemerintah Pusat Melakukan Reformasi Birokrasi Supaya Menjadi Kesatuan Kerja pada Tahun 2003. Kekerasan semakin Memanas dan melarut, Jenderal Eukkasan Khrutanun

Pimpinan polisi nasional, di minta ketemu dengan Perdana Menteri Thaksin Chinawat, dalam rangka melaporkan kejadian 28 April 2003 di tiga provinsi selatan Thailand. Dalam temuan diantara Jenderal Eukkasan Khrutanun dengan Perdana Menteri Thaksin Chinawat, Jenderal Eukkasan Khrutanun berjanji untuk menyelesaikan konflik dan menghapus pemberontakan separatis dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, serta mencari pelaku dalam peristiwa 28 April 2003. Jenderal Eukkasan Khrutanun meyakini bahwa mereka adalah sparatis di level yang rendah, dan beliau menegaskan lagi bahwa “dalam tempo tiga bulan saya akan menghabiskan para pemberotak sparatis, dalam satu bulan kami akan membunuh mereka 20 orang, dalam tempo tiga bulan sudah pasti selesai” ungkapan ikrar Jenderal Eukkasan Khrutanun kepada PM Thaksin Chinawat dalam pertemuan tersebut.³³

Pada tanggal 30 April 2002, Perdana Menteri Thaksin Chinawat peresmian lembaga kepolisian khusus di bawah Pusat Keamanan Polisi Nasional, yang bertanggung jawab di bagian ketiga provinsi Thailand Selatan, dan pada saat yang sama Perdana Menteri Thaksin Chinawat membatalkan

³³ Phibul Songkhram merupakan seorang yang bersifat ultra-nasional dan mementingkan nasionalisme kesiaman dalam pemerintahannya. Beliau berpendapat bahawa semua warga negara Siam perlu menjadi satu bangsa untuk bersama-sama bekerja memajukan negara. Bagi mencapai hasrat ini, pada Jun 1939 beliau secara rasminya menukar nama Siam kepada Thailand yang bermaksud tanah yang aman dan subur.

lembaga SBPAC, dan pusat pentatbiran Tentera devisa 43, sesuai dengan permintaan Jenderal Ekkasan Khutanun, Jenderal Pusat Keamanan Polisi Nasional, setelah perubahan kebijakan Perdana Menteri Thaksin Chinawat, konflik Patani dan pembunuhan masih berlaku. Pergerakan gerilya masih tindakan operasi bersenjata dan operasi sabotase di beberapa daerah berbatasan Thailand Selatan.

Pada tanggal 20 Juni 2002 Pukul 12.00 malam 5 Gerilya melancarkan operasi serangan senjata terhadap markas kompi militer, yang bertanggung jawab di Kawasan Kehutanan Nasional, daerah Thanto terdapat 17 rampasan senjata SK.33 dan 6 senjata mesin bersama peluru. Setelah operasi berhasil gerilya mengambil sikap mundur ke daerah Sipo Provinsi Narathiwat, bagi aparat polisi segera mengepung serta menangkap Saudara Usman sebagai curiga pelaku, sementara itu keluarga menemukan Saudara Usman dalam kondisi tewas di jalan raya kawasan provinsi Yala. Keluarga Usman Kengadu ke pihak polisi setempat disuruh memeriksa bagaimana terjadi tewas, oleh karena masih tahap curiga sebagai pelaku, justru pihak kepolisian hanya berdiam membisu tidak menjawab dan proses mencari pelaku dan fakta kejadian yang realitas siapa sebagai pelaku.

Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2002 sekitar pukul 13.00 siang pemberontakan pasukan gerilya melancarkan serangan dan rampasan senjata Camp Markas Kompi Militer yang bertanggung jawab di Kawasan Kehutanan Nasional Sipo Kecamatan Chelem Kabupaten Rangek Provinsi Narathiwat, terdapat 5 jumlah senjata mesin, kemudian mundur lari menghilangkan diri.

Pada tanggal 28 April 2003 sekitar pukul 02.00 malam, pemberontak pasukan Gerilya melancarkan serangan senjata Camp Markas Kompi Militer devisi 12 di kampong Beluka Yaing kecamatan Romsai kabupaten Sukhirin provinsi Narathiwat, operasi tersebut menghasil 5 Tentara terbunuh, 14 rampasan senjata mesin, sementara menghilangkan diri. Pada tanggal yang sama, pemberontak pasukan gerilya melancarkan serangan senjata Camp Markas Kompi Militer devisi 5 dikampung Banrea kabupaten Thanto Provinsi Yala, kemudian dapat merapatkan senjata M.16 sebanyak 17 laras, dan M 203 jumlah 2 laras, dan melarikan diri.

Pada tanggal 28 September 2003 Kepala Operasi Letnen Mani Ratnawin, Wakil Kepala Operasi Mayor Menti Mulphinit, Mayor Rongrut Kamoe kepala Kantor Polisi Kota Patani, ditembak oleh pasukan gerilya ketika pengepungan dan menangkap saudara Weahamad atau dikenal Mad Merok anggota Mujahidin Islam Patani (MIP), kemudian aparat tentera dan polisi sejumlah 100 pewira melakukan pengepungan dikampung Suwan Makprau, mendapat intruksi khusus adalah serangan mati terhadap gerilya tersebut. Sementara itu Malaysia sudah menangkap terduganya gerilyaan Nasea Senik dari pemberontakan Patani, kemudian pihak Polisi Thailand acuan pada Malaysia supaya diserahkan kepihak polisi Thailand.³⁴

Pada tanggal 25 oktober 2003 sekitar pukul 06.00 magrib, 5 gerilyaan melakukan serangan Camp Relawan Tentara Keamanan kabupaten Bachok Provinsi Narathiwat. Sempat membunuh Relawan Tentera Keamanan Daerah

³⁴ Belitan sejarah (2000) [Online].[Akses 13 Mac 2004]

tersebut, sudara Soleh Wamad tewas, Relawan Tentera Keamanan Saudara Maknari Asealeh, Saudara Nawe Ding mengalami luka dan merampas senjata SK dan M.16 jumlah 4 laras.

d. Aparat Pemerintah Thailand Menemukan Dokumen Rahasia Susunan Pemberontakan Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada Tahun 2003.

Pada tanggal 1 Mae 2003 Aparat Polisi sempat menemukan dokumen rahasia dari bangku meja kerja Ustaz Masea Useng di saat kepongan rumah tersangka, korban adalah salah satu guru mengajar di sekolah pondok Samphan Withaya Kabupaten Chok-Airong Provinsi Narathiwat. Aparat Keamanan Nasional meyakini bahwa Ustaz Masea Useng adalah anggota pangkat pimpinan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Dokumen tersebut mengandung rahasia susunan dekenal sebagai “Tujuh Langkah Menuju Kemerdekaan” rahasia tersebut sering kali menjadi alasan pergerakan revolusi Patani yang di pimpin oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN-Coordinate)

Surachat Banrungsukh penasihat terharmat Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional, menjelaskan rahasia susunan revolusi tujuh langkah menuju kemerdekaan, setelah ditemukan dokumen rahasia dari ustaz Masea Useng pada tanggal 1 Mae 2003 dan pada tanggal 20 Mae 2005 di sebuah Pondok Pesentrin Jihad atau dikenal pada istilah Thai Sekolah Jihad Withaya kampung Thadan Kecamatan Takluk Kapu Provinsi Patani

Pemberontak yang di pimpin oleh BRN-Coordinate sedangkan anggota pangkat pemimpin organisasi rata-rata berasal dari tokoh-tokoh ulama,

pemimpin- pemimpin agama di peringkat Ulama yang ada di ketiga provinsi selatan umumnya, dengan melaku operasi yang terpadu dari tujuh langkah menuju kemerdekaan sejak dari tahun 1992 M, pada tahun tersebut pondok pesantren sebagai sentral penyusunan dan penyadaran, baik pemuda yang ada di dalam sekolah atau di luar sekolah setelah itu mendaftar sebagai pergerakan revolusi, diumumkan sebagai “Pejuang” atau “Pemuda Revolusi Kemerdekaan Patani”

Kelompok tersebut lanjutkan menjadi pergerakan baru yang terlatih, kesadaran nasional yang kompleks, dan tampilan agama yang tampan, mempunyai dasar ideologi pergerakan sosialis, nasionalis, dan islamis, kemudian keterampilan yang karismatik, kuat agama dan dapat diterima sebagai status mereka dari pandang sudut masyarakat umumnya. Tujuh langkah menuju kemerdekaan Patani ialah strategi penyusunan, persatuan rakyat dalam koordinasi pergerakan dan penentuan perang rakyat semesta dengan tempo yang jelas.

Tujuh langkah menuju kemerdekaan, aparat keamanan dan pertahanan menjelaskan langkah tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama langkah 1- 5 adalah langkah penyusunan persatuan rakyat dan persiapan tenaga dengan melalui rakyat, persatu rakyat dan ideologi rakyat, langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Langkah pertama: Penyadaran Rakyat, dengan mengidealogikan masyarakat Patani melalui agama Islam tidak boleh dibawah penguasa yang

zalim dan penjajah, melalui kesadaran nasional melayu sebagai identitas bukan berasal dari etnis Siam, melalui bangsa melayu Patani yang di jajah oleh penjajah Siam, melalui adanya penjajah di bumi Patani harus dibebaskan dan dimerdekakan Patani, melalui beberapa alasan di atas kita harus bangkit melawan penjajah Siam. Langkah kedua: Penyusunan Rakyat, susunan pergerakan di sekolah agama, sekolah Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA), sekolah pondok, staf masjid, koperasi, persatuan/organisasi dan ormas. Langkah ketiga: Penyusunan Organisasi, sebagai pusat pergerakan rakyat, pusat ekonomi rakyat, pusat politik rakyat, pusat pengawasan rakyat.

Langkah Keempat: Penyusunan Kekuatan, adalah penyusunan pergerakan dalam bidang militer, dibagi menjadi 3 pasukan. Pertama pasukan pemuda pembela Patani sebanyak 30.000 orang. Kedua pasukan pemuda komando atau runda kumpulan kecil (RKK), sebanyak 3.000 orang. Dan pasukan tentera komando sebanyak 300 orang. Langkah kelima: Kesadaran Nasional, langkah kesadaran bangsa melayu patani di mana dia berada bangkit melawan dengan melakukan aksi apa saja sesuai dengan tingkatan dan kemampuan masing-masing.

Langkah Keenam: Persiapan Bunga Revolusi, langkah ini adalah langkah persiapan perang rakyat semesta, dengan mulalui tindakan-tindakan kekerasan seperti; tindakan senjata, sabotase, bakar-membakar, dan lain sebagainya. Langkah ketujuh: Penyusunan Revolusi dan Gerakan Revolusi, dalam tahapan ini adalah kekuatan revolusi dengan kekuatan politik masa rakyat, kekuatan ekonomi berdikari, kekuatan militer berani mati.

e. Serangan Rampasan Senjata Markas Batalion Militer Devisi 4 Provinsi Narathiwat pada Tahun 2004.³⁵

Pada tanggal 4 Januari 2004 sekitar pukul 02.00 malam gerilyawan komando sekitar 80 orang berserta dengan pemberangkatan dengan 5 mobil truk menuju ke kampong Dangok kecamatan Marebo Ouk kabupaten Chok Airong provinsi Narathiwat, menuju ke Markas Battalion Militer devisi 4 Narathiwat Rachenakharin. Setelah itu melakukan serangan rampasan senjata, mengakibatkan 4 tentera tewas dan dapat merampaskan senjata sekitar 400 ralas bersama peluru sejumlahnya, sementara itu melarikan diri dengan menggunakan mobil truk tersebut.³⁶

2. Peristiwa Pembantaian Takbai Provinsi Narathiwat Tahun 2004

Takbai adalah salah satu kabupaten provinsi Narathiwat, secara geografi disebelah timor tenggara perbatasan Thai-Malay, disebelah barat tenggara pinggir laut indo china, bagian utara provinsi Narathiwat, dibagian selatan kabupaten Sungai-Kolok pada tahun 2004 penduduk kabupaten Takbai sekitar 80% adalah penduduk muslim, sementara pekerjaan penduduk Takbai sebelum 2004 mayoritas sebagai nelayan, tetapi setelah tahun 2004 mayoritas pedangang, oleh karena geografi perbatasan Thai-Malay sangat strategis untuk berdagang dikawasan pinggir sungai Kolok, turis dari Malaysia seringkali berkunjung

³⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41466838> diakses pada tanggal 4 November 2023.

³⁶ Pada awal tahun 1960-an, beberapa gerakan pemisah muncul yang berjuang untuk kemerdekaan Patani. Di antara mereka adalah Barisan Revolusi Nasional Patani (BRN), Barisan Nasional Perjuangan Patani (BNPP), dan Pattani United Liberation Organisation (PULO). Tindakan yang mereka lakukan melibatkan kampanye berdasarkan isu pendidikan agama Islam, bahasa, dan kehormatan Kesultanan Melayu Patani untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Melayu. Strategi yang mereka terapkan adalah dengan menyebarkan risalah-risalah dalam bahasa Melayu, Jawi, Thai, dan Inggris di seluruh wilayah selatan dan di sekitar perbatasan.

dikawasan tersebut. Membuat ekonomi penduduk Takbai jauh lebih baik dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Setelah peristiwa serangan rampasan senjata Markas Batalion Militer divisi 4 Narathiwat Rachnakhirin pada tanggal 4 Januari 2004, peristiwa tersebut tampak negatif pada provinsi Narathiwat umumnya, konflik kekerasan diantara pihak aparat polisi dan pemberontak semakin mengkhawatirkan, sementara ini konflik tersebut melarut kepada warga masyarakat Patani menjadi tidak aman. Dengan demikian itu aparat pemerintah bersama aparat polisi dan tentera mengeluarkan kebijakan melalui program keamanan kampung, semetara itu pihak tentera dengan tepat mengambil kebijakan latihan warga masyarakat menjadi “Tentera Keamanan Kampung (TKK)” sekitar 10-20 orang setiap kampung, bertujuan mengamankan kampung, memantau gerakan pemberontak serta menjadi kaki-tangan pemerintah dalam menjaga kestabilitas kampung. Setelah selesai latihan TKK pihak tentera memberi pelengkapan senjata senapang, TKK yang sudah terlatih ketiga provinsi Thailand Selatan, Pattani, Yala dan Narathiwat diberikan senjata senapang sekitar 4.000 ralas.

Pada tanggal 12 Oktober 2004 sejumlah 6 orang anggota TKK dari Kampung Khok-Kuwea Kecamatan Phron Kabupaten Takbai Provinsi Narathiwat, anggota tersebut adalah;

1. Sudara Arun Binmad,
2. Sudara Rukimeli Hakiarin,
3. Sudara Abdulramai Hakiarin,

4. Sudara Kama Ali,
5. Sudara Roning Benmad dan
6. Sudara Mahamad Rumeli.

Mereka tersebut mengadu Polisi Kantor Takbai bahwa senjata senapan yang diberikan oleh aparat pemerintah sebelumnya sudah dirampas oleh pihak pemberontak. Pada pagi hari tanggal 13 Oktober 2004 aparat polisi Takbai langsung menahan anggota TKK sementara di siasat senjata yang hilang, oleh karena aparat polisi menduga 6 orang TKK tersebut di duga kemungkinan terlibat dalam kasus senjata yang di rampas.

Pada tanggal 24 Oktober 2004, tentera Markas Batalion Militer divisi 4 Narathirat Rachnakhirin mendapatkan laporan dari kepolisian Takbai mengenai ditangkap dengan kasus senjata yang di rampas sementara militer meminta kepada pihak polisi menahan anggota TKK untuk di periksa dengan pihak tentera sendiri, oleh karena peristiwa rampasan senjata di Markas Batalion Militer divisi 4 Narathiwat Rachnakhirin pada tanggal 4 Januari, pihak tentera menduga kasus rampasan senjata anggota TKK ada suatu keterlibatan senjata yang di rampas oleh pemberontak, oleh karena itu polisi Takbai meminta surat supaya pihak Mahkamah Agung di perpanjang hukum darurat (menahan para tersangka) dan mengikuti proses hukuman sesuai dengan aturan Mahkamah Agung, setelah

tentera periksa tahanan tersebut realitas kenyataan menurut tentera mereka ada keterlibatan kasus senjata yang hilang pada tanggal 12 Oktober pekan lalu.³⁷

Pada tanggal 25 Oktober, pukul 06.00 pagi sekelompok keluarga korban ke Kantor Kepolisian meminta tanggungan para tersangka yang di tahan, oleh karena tempo waktu tahanan tersebut sudah berakhir menurut undang-undang darurat Militer (*Emergency Decree*) yang berlaku sejak awal tahun 2004 undang-undang darurat militer yang berlaku khususnya di kawasan provinsi Narathiwat, Yala, Patani dan 4 kabupaten Provinsi Songkhla. Jika tahanan tidak ada barang bukti yang jelas sebagai fakta kesalahan secara hukum, maka pihak polisi dapat tahan pelaku tersangka dalam tempo waktu 7 hari setelah itu harus dibebaskan tahanan pelaku tersebut, Justru, pihak polisi tidak mau dibebaskan pelaku tersebut, demikian itulah warga korban merasa tidak memuaskan atas keputusan sewenang-wenangnya.

Pada pagi pukul 09.00, tanggal 25 Oktober 2004, warga masyarakat sekitar jumlah 200 orang pemuda setempat bergabung mengumpul melakukan demonstrasi di depan Kantor Kepolisian Takbai dengan tujuan membebaskan tahanan Anggota TKK yang tidak bersalah, Para demonstiran melakukan aksi seperti; tanda-tanda tulisan kata-kata ;

Pada pukul 12.00-15.00 hari yang sama, para demonstiran pelan-pelan bergerak mengumpul kekuatan sekitar 2.000 orang pemuda dan masyarakat di depan Kantor Kepolisian Takbai, sementara aparat polisi melihat kondisi semakin

³⁷ Rahimmula, C.(2001) *Peace Resolution : A Case Study of Separatism and Terrorist Movement in Southern Border Provinces of Thailand*. [Online].[Akses: 2 Ogos 2005]. Boleh diperolehi melalui Laman Web: <http://www.geocities.com/bluesing2001/media/peaceresolution.htm>

melebar sehingga aparat polisi mengeluarkan kebijakan dengan coba menghadirkan kepala desa dan kepala kampung menjadi mediator dalam penyelesaian di antara polisi dengan para demonstran supaya menghentikan demonstrasi di depan Kantor Polisi, usha polisi terakhir mengundang tokoh karismatik Sahebukhari Sahehamad mantan DPD kabupaten Takbai, Sudara Nikphot Naraphithakul Wakil Wali Kota Provinsi Narathiwat, Sudara Rosak Samaali Sekretaris Majelis Islam (MI) cabang Narathiwat sebagai mediator dalam penyelesaian kasus tersebut. Wakil Menteri Pertahanan Negara pusat pertahanan polisi devisi 9 Letnan Phitsan Wathanawungsyirit berusaha menghentikan para demonstrasi dengan secara damai, bahkan akhir perancangan tersebut gagal. Para demonstrasi masih bertahan dalam tujuan yaitu harus membebaskan tahanan TKK, sementara aparat polisi dan tentara masih keras tetap atas keputusan Mahkamah Agung harus mengikuti proses hukuman yang ditentukan, kondisi semakin memanas aksi para demonstran terus melakukan reaksi berbagai bentuk supaya aparat polisi membebaskan tahanan tersebut.

Pada sekitar pukul 15.30 pada tanggal 25 Oktober, Letnan Phitsan Wathanawungsyirit pimpinan pasukan battalion devisi 4 mengambil keputusan spontan memubarkan para demonstrasi dengan mengguna truk air yang berisi gas mata dan bom gas ke arah para demonstrans yang sedang berkumpul di depan kantor polisi, dengan alasan aparat polisi menganggap bahwa para demonstran mempunyai senjata, justru, menurut laporan channel para demonstran tidak mempunyai senjata apa-apapun bahkan mereka sedang menunggu waktu buka puasa, tidak lama terdengar suara tembakan yang arah menuju ke para demonstran

sementara mereka bertubi-tubi melarikan diri cari aman sebagian para demonstrasi di tangkap dan di garing tangan sehingga ada sebagian di tembak mati, suara tembak berterusan sekitar 30 menit setelah itu baru henti mengakibatkan para demonstiran 6 orang langsung tewas setempat nama korban sebagai berikut :

1. Sudara Awealoh Pakchukuleng, usia 53 tahun No rumah 59/8 Mukim 3 Kecamatan Chuat Kabupaten Chok-Airong Provinsi Narathiwat,
2. Sudara Makoseng Mamad, usia 20 tahun No rumah 120/1 Mukim 5 Kecamatan Salamai Kabupaten Takbai Provinsi Narathiwat,
3. Sudara Muhammad Saitu Koseng, usia 21 No rumah 64 Mukim 2 Kecamatan Chehe Kabupaten Takbai Provinsi Narathiwat,
4. Sudara Mahamad Asymy Awea, usia 23 tahun No rumah 22 Mukim 6 Kecamatan Chehe Kabupaten Takbai Provinsi Narathiwat,
5. Sudara Tuwea Harong Mahamadseng No rumah 22 Mukim 6 Kecamatan Chehe Kabupaten Takbai Provinsi Narathiwat,
6. Sudara Abdul Tholek Seado usia 21 No rumah 23 Mukim 1 Kecamatan Kaluwoa Kabupaten Meung Provinsi Narathiwat.

Selain itu parat polisi dan tentara menangkap serta di tahan para demonstrasi jumlah total 1.298 orang, serta di angkot para demonstiran ke penjara militer di markas batalion militer Engkhyuthaborihan, jarak peristiwa yang berlalu pembantaian Takbai Narathiwat ke markas Patani sekitar 150 kilometer jarak perjalanan, semua tahanan 1.298 orang dengan kondisi tidak pakai baju tangan digaring serta di angkot ke atas mobil truk dengan berlapis-lapisan setinggi 4-5 lapis ketinggiannya.³⁸

³⁸ Ibrahim, S., 88, 96 dan 101.

3. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Peristiwa Pembantaian Takbai Tahun 2004

a. Respons Para Ulama Terhadap Peristiwa Pembantaian Takbai Tahun 2004

Para Tokoh Islam mengutuk langkah-langkah aparat keamanan dalam menangani kerusuhan. Para aktivis Islam juga menuduh pasukan keamanan Thailand menggunakan kebijakan penanganan yang terlalu keras di provinsi selatan, termasuk pembantaian masjid Grisek yang mengakibatkan 32 warga Muslim tewas dalam kerusuhan 28 April 2004, dan pembantaian Takbai yang mengakibatkan Muslim tewas. 1.298 warga Muslim korban sakit dalam peristiwa tersebut.

Sejumlah tokoh Agama dan aktivis Islam yang diwawancarai dikawasan Provinsi Yala dan Narathiwat berpendapat dengan mengatakan bahwa:

“Keadaan demikian sudah dirasakan rakyat di wilayah selatan Thailand sejak kerajaan Siam mencaplok kerajaan Patani tahun 1902. Kami adalah bangsa dengan identity Melayu yang sangat berbeda dengan bangsa Siam. Ini merupakan fakta sosio-historis dan sudah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Thailand”³⁹

Bahwa watak kolonial pemerintah pusat terhadap rakyat di wilayah selatan, tampak kasatmata dalam penanganan unjuk rasa di Tak Bai. Manusia disusun bertindihan hingga lima lapis. Mereka Awaludin, Hamid, Krisis Thailand Selatan, Jakarta: Kompas, 4 April 2012 halaman 7 kolom1-3 memperlakukan warga turunan Melayu melebihi binatang. Hal yang mustahil mereka perbuat terhadap warga Siam, pendapat seorang aktivis Islam lulusan al-Azhar, Cairo.

³⁹ ujar Abdul Samad.

“Namun agar hubungan tersebut tetap tampak serasi dari luar, Pemerintah Thailand menggunakan teror terhadap warga yang mempertanyakan hak-haknya. Setiap saat warga bisa dijemput pada malam hari. Rumahnya dikepung puluhan aparat keamanan dengan tuduhan separatist Islam. Peristiwa seperti ini menimbulkan ketakutan bagi warga lainnya”,⁴⁰

Demikian juga ungkapan pemimpin agama dari Desa Teluk Manak, Narathiwat, Qori Abdullah berusia 60 tahun, mengatakan:

“Permintaan maaf Thaksin tidak berarti karena beratus-ratus umat Islam telah dibunuh dengan kejam. Bahwa pada saat ini kepercayaan umat Islam terhadap kerajaan Thaksin semakin genting karena mereka keliru dengan tindakan kebrutalan aparat keamanan yang tidak berperikemanusiaan”⁴¹

b. Respons Cendekiawan Terhadap Peristiwa Pembantaian Takbai Tahun 2004

Wilayah Patani saat ini menjadi sorotan utama dalam liputan surat kabar, siaran radio, dan televisi di berbagai negara. Kejadian tragis yang menewaskan sekitar 85 penduduk Muslim Patani telah menarik perhatian baik di dalam negeri maupun internasional, memfokuskan sorotan pada kawasan selatan Thailand tersebut. Sebenarnya, kerusuhan di Patani sudah berlangsung cukup lama. Umat Muslim, sebagai kelompok minoritas di negara Gajah Putih, khususnya di daerah Patani, Yala, dan Narathiwat, telah lama mengeluhkan diskriminasi dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan lapangan kerja. Meskipun telah menetap di provinsi-provinsi tersebut selama berabad-abad, mereka masih menghadapi perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat.

⁴⁰ tutur seorang aktivis Islam lulusan IAIN Yogyakarta.

⁴¹ pemimpin agama dari Desa Teluk Manak, Narathiwat, Qori Abdullah

Chayan Vaddhanaphuti, seorang tokoh antropologi dari Universitas Chiang Mai di Utara Thailand, memberikan pandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak memaksakan kebijakan yang berlaku bagi kelompok minoritas lain kepada warga Muslim di Thailand Selatan. Mengingat sejarah khusus dan mayoritas mereka di wilayah tersebut, mereka mengalami kurangnya toleransi dalam hal ini. Vaddhanaphuti juga menyatakan bahwa pejabat pemerintah dan birokrasi memiliki peran dalam menciptakan kegelisahan di kalangan warga Muslim Thailand Selatan, yang melibatkan sensitivitas budaya dan agama mereka.⁴²

Beberapa cendekiawan Thailand mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur perpaduan sosial dan etnik guna menjaga citra Thailand sebagai negara yang toleran di antara negara tetangga seperti Myanmar, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Meskipun belum terjadi kerusuhan etnik di Thailand, beberapa kasus mirip kerusuhan antar suku telah muncul. Chaiwat Sath-Anand, Direktur Pusat Informasi Perdamaian di Universitas Thammasat di Bangkok, berpendapat bahwa pemerintah harus kembali kepada karakter masyarakat Thailand yang lentur untuk mengakomodasi perbedaan sosial dan budaya, dengan menentukan kebijakan utama terkait kelompok minoritas, mempertimbangkan asimilasi dan integrasi agar warga Muslim dapat diterima dengan identitas budaya berbeda.

Dampaknya, warga Muslim di Selatan merasa budaya mereka terpinggirkan, dan mereka mulai merasa terasing. Mantan Menteri Luar Negeri Thailand, Surin Pitsuwan, menekankan pentingnya memberikan jaminan bahwa budaya, agama,

⁴² Republika, 5 Nopember 2004.

dan tradisi warga Muslim dihormati dan dilindungi, sambil mendorong partisipasi mereka. Menurutnya, solusi mungkin terletak pada penghormatan terhadap identitas budaya mereka.

Surin Pitsuwan juga menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap kaum Muslim di Thailand Selatan mencerminkan ketidakpekaan pemerintah. Oposisi sebelumnya telah memperingatkan tentang kesalahan penanganan di Thailand Selatan, namun peringatan tersebut diabaikan oleh pemerintahan PM Thaksin. Surin menyatakan bahwa sejarah menunjukkan Patani awalnya merupakan daerah independen, dan masyarakat di sana tidak menentang pembangunan, tetapi mereka menginginkan pembangunan yang bertahap sesuai kemampuan mereka, agar mereka tidak hanya menjadi penonton. Surin berpendapat bahwa di Thailand Selatan, dibutuhkan bukan hanya pembangunan, tetapi juga keinginan pemerintah untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dia mencatat bahwa pemerintahan Thaksin terlalu fokus pada pendekatan bisnis tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan memahami kebutuhan masyarakat.

c. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Tragedi Takbai

Selama ini, situasi di Thailand Selatan telah dipandang sebagai konflik antiterorisme, sehingga kurang mendapat empati dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, media alternatif seperti Deep South Watch (DSW) memainkan peran penting dalam memberikan informasi detail dan akurat tentang situasi di Pattani. Meskipun populasi Pattani hanya sekitar 2 juta jiwa, konflik yang dirasakan oleh masyarakat Pattani dianggap sebagai masalah internal Thailand,

bukan isu internasional. Namun, dampaknya dapat memengaruhi stabilitas di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hubungan antara Thailand dan Indonesia. Oleh karena itu, media di kawasan tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mengupayakan perdamaian.

DSW, yang berperan sebagai lembaga media sosial di wilayah selatan Thailand, berpusat di kampus Universitas Songkhla Nakharin di Pattani. DSW bertujuan untuk menganalisis kekerasan di Thailand Selatan dengan pendekatan data dan analisis yang rasional. Meskipun lebih fokus pada kelas menengah, DSW telah mulai bekerja sama dengan Friend of the Victimized Families Group yang dipimpin oleh Soraya Jamjuree, untuk melakukan advokasi bagi hak-hak korban kekerasan.

Kelompok masyarakat sipil dan organisasi lokal semakin berkembang, menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika konflik di Thailand Selatan. Diskusi tentang identitas lokal dan sejarah panjang semakin mendapat perhatian, sementara upaya perdamaian dan negosiasi juga semakin diperjuangkan sebagai isu yang penting. Dengan demikian, konflik pemberontakan di Thailand Selatan terus berkembang dan memunculkan potensi baru dalam menangani kekerasan yang telah mempengaruhi masyarakat di Deep South selama bertahun-tahun.⁴³

Deep South Watch, yang didirikan pada tahun 2006, merupakan sebuah organisasi platform yang berbasis di Kampus Pattani Prince of Songkla University di Thailand Selatan. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik atau platform yang memfasilitasi perdamaian di wilayah konflik kekerasan di selatan

⁴³ Mohd Zamberi, A.M. (1993)., 251.

Thailand, terutama di wilayah Patani. Deep South Watch berupaya menciptakan ruang politik untuk berbagai pihak yang terlibat dalam konflik guna berpartisipasi dalam proses penyelesaian dengan aman, sambil membangun wacana publik yang memungkinkan semua pihak terlibat untuk berdiskusi dan menemukan solusi dalam mengatasi konflik kekerasan tersebut. Tujuan dari upaya ini bukan hanya untuk menciptakan pemahaman yang realistis dan komprehensif tentang konflik, tetapi juga untuk mengurangi pembenaran terhadap penggunaan kekerasan dari semua pihak dalam konflik serta membuka peluang untuk negosiasi tanpa ancaman dan paksaan. Dengan demikian, Deep South Watch berupaya menggunakan pendekatan non-kekerasan secara konstruktif untuk merubah dinamika konflik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, *Deep South Watch* mengoperasikan tindakan berdasarkan “3 modul,” yang meliputi kolaborasi terbuka yang memungkinkan setiap modul untuk saling mendukung dalam praktik mereka sendiri. Mereka juga berupaya memperkuat partisipasi masyarakat lokal sambil membangun jaringan komunikasi yang mencerminkan beragam suara, gambaran, dan perspektif dari berbagai pihak, terutama suara-suara dari wilayah konflik itu sendiri. *Deep South Watch* juga menjalin hubungan antara wilayah tersebut dengan jaringan komunikasi nasional guna mendorong pemahaman dan mendukung upaya menuju perdamaian.⁴⁴ Pada tahun 2013, Deep South Watch mengadakan forum politik yang fokus pada isu perdamaian, pembebasan, dan hak asasi manusia di tingkat yang signifikan dalam menangani undang-undang

⁴⁴ Menurut pendapat Nik Abdul Ghani Bin Nik Hashim, Pensyarah *Prince of Songhla University*, Kampus Pattani pada 8 September 2006..

darurat, terutama di tiga provinsi selatan Thailand. Program “Bicara Patani” bertujuan untuk menjangkau wilayah pedesaan dan perkotaan, sambil tetap memperhatikan peranannya dalam tingkat internasional. Sejak tahun 2013 hingga 2014, program ini telah dilaksanakan sebanyak 62 kali, dengan rincian 29 kali di Provinsi Patani, 6 kali di Yala, 9 kali di Narathiwat, 6 kali di wilayah Songkhla, 2 kali di Hatyai, dan 8 kali di luar negeri, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi.

d. Peningkatan Aksi Masyarakat

Penegakan Undang-Undang Darurat (Menolak Darurat: Dekrit Darurat). Pemerintah rezim Thailand dinilai tidak adil dalam penerapan hukum yang cenderung diskriminatif terhadap Muslim Patani di Selatan Thailand, dengan penerapan tiga jenis hukuman yang merugikan. Ketiga jenis hukuman yang merugikan tersebut adalah sebagai berikut:

Hukum Militer, di mana pemerintah Thailand memiliki hak untuk menangkap individu yang dicurigai akan mengganggu ketertiban atau mengancam keberadaan tentara Thailand. Individu yang ditangkap bisa dipenjara tanpa proses penyelidikan selama tujuh hari.

Dekrit Darurat, jika pemerintah merasa bahwa hukuman militer belum cukup, mereka dapat memperpanjang masa penahanan menjadi 30 hari. Penahanan dilakukan tanpa proses penyelidikan. ISE (*Internal Security Act*), jika dua bentuk hukuman sebelumnya dianggap tidak cukup, penahanan dapat

dilakukan selama 6 bulan hingga 3-4 tahun, tergantung pada kebijakan pemerintah Thailand.

Pada tanggal 31 Juni 2007, sekitar 10.000 orang dari masyarakat Thailand selatan berkumpul di Masjid Besar Patani untuk menuntut kesetaraan hak, kebebasan, dan kehidupan yang aman. Mereka juga menyerukan kebebasan berbicara dan masyarakat yang demokratis. Aksi demonstrasi ini bertepatan "Menolak Darurat: Dekrit Darurat".

Peningkatan Peran Majelis Ulama Patani Darussalam, Pada Senin, 9 Rabiul Awal 1434 H, yang bertepatan dengan 12 Januari 2013 M, Majelis Ulama Patani Darussalam diresmikan secara resmi di Kampung Panarit, Kecamatan Barahum, Kabupaten Meang, Provinsi Patani. Peresmian majelis ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan "Majelis Maulidin Nabi" di wilayah tersebut, yang kemudian menjadi markas bagi "Yayasan Dewan Ulama Patani". Sebagian tanah tempat yayasan ini berdiri merupakan tanah milik Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fathoni, seorang tokoh Islam Patani terkenal pada masa lalu.

Sebelum menjadi Majelis Ulama Patani Darussalam, organisasi ini mengalami beberapa hambatan dalam pembentukannya. Namun, melalui upaya keras dari beberapa ulama setempat, jamiah ini akhirnya terbentuk pada tahun 1974. Jamiah ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkini terkait agama, termasuk akidah, hukum fiqih, dan isu-isu lain yang relevan, dengan mengeluarkan fatwa untuk masyarakat umum.

C.Kajian Temuan

1. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa kurangnya sensitivitas terhadap agama dan budaya memperburuk konflik di Thailand Selatan. Namun, konflik ini sebenarnya melibatkan kelompok elit pemimpin Muslim-Melayu yang radikal dan pemerintah yang menanggapi dengan tindakan militer, bukan konfrontasi antara komunitas Buddha dan Muslim-Melayu. Ketegangan masyarakat setempat disebabkan oleh ketidakadilan dalam kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat, meskipun masyarakat setempat hanya menginginkan kesejahteraan dan kehidupan yang damai.

Dalam penyelesaian konflik, pemerintah Thailand meningkatkan kehadiran militer dan polisi sebagai taktik "penjaga perdamaian," tetapi hal ini tidak menghentikan kekerasan dan hanya menghasilkan kedamaian negatif. Strategi lain melibatkan pendekatan "perdamaian" dengan melibatkan kegiatan politik. Meskipun telah dilakukan dialog perdamaian resmi antara Thailand dan kelompok pemberontak, sikap negatif di kalangan masyarakat setempat masih ada.

Dalam upaya mencari solusi, muncul kelompok masyarakat yang kreatif, fokus pada perjuangan substansial, dan menekankan isu-isu yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mereka memperkuat kesadaran politik, memahami dan melestarikan budaya, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya budaya, termasuk warisan budaya dan

agama, menjadi penting untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari berbagai komponen masyarakat.

Sektor masyarakat sipil, terutama kalangan terdidik seperti akademisi, profesional, tokoh agama, dan LSM, memainkan peran penting dalam upaya menciptakan perdamaian. Mereka berkontribusi dalam memberikan pemikiran, ide, dan solusi melalui kegiatan penelitian, seminar, konferensi, dan diskusi. Kolaborasi antarakademisi dan institusi akademik, seperti yang dilakukan melalui Jaringan Perdamaian Thailand Selatan, memperkuat potensi sektor masyarakat sipil dalam mengurangi kekerasan dan membangun perdamaian berkelanjutan.

Lembaga-lembaga riset seperti Deep South Watch (DSW) di Prince of Songkla University menyediakan data dan analisis mendalam mengenai konflik dan kekerasan di Thailand Selatan. Meskipun tantangannya besar, sektor akademik, terutama dalam universitas di daerah konflik, berusaha aktif dalam memberikan pemahaman, penelitian, dan solusi untuk mengatasi masalah.

Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti keputusan pengadilan terkait peristiwa pembantaian Tak Bai tahun 2004 dan pendekatan militer Thaksin Shinawatra, turut berperan dalam perkembangan konflik. Meskipun terdapat kelemahan dalam pendekatan militer, sejumlah lembaga akademik di Thailand

Selatan dan sektor masyarakat sipil terus berupaya untuk mencari solusi dan membawa perdamaian ke wilayah tersebut.⁴⁵

2. Beberapa pertimbangan yang mungkin diajukan untuk menangani Tragedi Takbai Thailand termasuk:

- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Penilaian apakah tindakan aparat keamanan dalam tragedi Tak Bai melanggar hak asasi manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- Prosedur Hukum: Pemeriksaan terhadap prosedur hukum yang diterapkan selama dan setelah peristiwa tersebut, dan apakah proses-proses ini sesuai dengan standar hukum yang berlaku di Thailand.
- Tanggung Jawab Hukum: Pertimbangan apakah ada pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut, baik secara individu maupun secara institusional.
- Peran Hukum Darurat: Evaluasi kebijakan penerapan hukum darurat dalam situasi tersebut dan apakah hal tersebut sesuai dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia.
- Penyelesaian Damai: Pertimbangan apakah terdapat alternatif penyelesaian damai atau pendekatan lain yang dapat diambil untuk menghindari tragedi serupa di masa depan.

⁴⁵ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta, LP3ES, 1982)133

3. Pada peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004 di Provinsi Narathiwat, Thailand, penegakan hukum hak asasi manusia mengalami tantangan yang kompleks dan kontroversial. Peristiwa ini melibatkan tindakan kekerasan yang menyebabkan sejumlah besar korban, termasuk luka-luka dan korban tewas. Berikut adalah beberapa aspek penegakan hukum hak asasi manusia terkait peristiwa tersebut:

Penyelidikan dan Kejelasan Angka Korban: Proses penyelidikan atas peristiwa ini harus memastikan kejelasan angka korban yang akurat. Adanya perbedaan angka korban antara laporan media pemerintah dan sumber independen menimbulkan keraguan dan menunjukkan pentingnya transparansi dan keakuratan informasi.

Akuntabilitas Pihak Keamanan: Penegakan hukum harus memastikan akuntabilitas pihak keamanan yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. Ini melibatkan identifikasi dan penuntutan terhadap mereka yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

Perlindungan Hak Korban: Sistem peradilan harus memberikan perlindungan hak-hak korban, termasuk hak atas keadilan, pengobatan, dan kompensasi. Korban yang selamat dari tragedi ini harus diberikan dukungan psikologis, medis, dan hukum untuk memastikan pemulihan mereka.

Transparansi dan Keterbukaan: Proses hukum dan penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Keterlibatan pihak independen,

termasuk lembaga hak asasi manusia, dapat membantu memastikan objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

Upaya Pencegahan: Penegakan hukum hak asasi manusia juga melibatkan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ini termasuk perubahan kebijakan dan praktik keamanan yang dapat mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Kolaborasi Internasional: Kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penegakan hukum dapat memperkuat upaya menegakkan hak asasi manusia. Keterlibatan lembaga internasional dan tekanan dari masyarakat internasional dapat membantu memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan transparan.

Penanganan Akar Penyebab Konflik: Selain penegakan hukum, upaya penyelesaian konflik jangka panjang juga harus diupayakan. Ini melibatkan identifikasi dan penanganan akar penyebab konflik di wilayah tersebut, seperti ketidaksetaraan politik dan ekonomi serta isu-isu identitas budaya.

Penegakan hukum hak asasi manusia terhadap peristiwa pembantaian Takbai tahun 2004 memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak dan lembaga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan agar masyarakat dapat memulihkan kepercayaan mereka pada sistem hukum dan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti, membahas dan menganalisis data mengenai “Peristiwa Pembantaian Takbai Selatan Thailand (Patani) 25 Oktober 2004”, selanjutnya penulis menarik kesimpulan:

1. Dinamika historis Melayu Patani sebelum peristiwa pembantaian Takbai 25 Oktober 2004, cukup panjang, berawal dari Kerajaan Melayu Islam Patani adalah suatu Negara yang berdaulat dan berkuasa pada abad 14-17 M. Sehingga pada tahun 1785 M. Patani dijajah oleh kerajaan Siam (Thailand) dan diresmikan melalui perjanjian ‘Anglo Siamese-Treaty’ Siam-Inggris pada tahun 1902 M. Selama 117 tahun sejak dari tahun 1785- 1902 dirampas kuasa politik dalam mengatur dan sebagai bumi jajahan Siam. Orang Melayu Islam Patani berada di dalam kekuasaan pemerintah kerajaan Siam (Thailand) dengan berbagai siasat kebijakan seperti ;1. Bidang Politik yang bersifat Imperialistik (bangsa atau Negara yang menjalankan politik menjajah bangsa atau Negara), kolonialistik (penguasaan suatu daerah dan rakyatnya oleh Negara lain untuk tujuan yang bersifat militer dan ekonomi), 2. Bidang Ekonomi bersifat kapitalistik (penjajah dalam bidang ekonomi), eksploitatif (penghisapan sumber ekonomi dan keuntungan pribadi), 3. Bidang Sosial bersifat feodalistik (kelas penjajah yang berkuasa), Diskriminatif (pemeras dan 130 pengzalimi yang dijajah), 4. Bidang Budaya bersifat ultra super nasiolistik (paham kebangsaan Siam), asimilatif (telan

menelan budaya), 5. Bidang Militer bersifat ekspansionalistik (meluaskan wilayah jajahan dengan operasi militer, politik, ekonomi), 6. Bidang Agama bersefat sekularistik (memisah agama dengan politik), Dengan kebijakan tersebut masyarakat Melayu Islam Patani berada di dalam acaman dan kezaliman yang cukup parahnyanya. Pada tahun 1932 Patani menjadi sebuah provinsi yang diresmikan dalam undang-undang dasar Thailand. Pada tahun 1943 tumbuhnya pergerakan pembebasan Patani dari penjajah oleh Tengku Muhmud Maiyedin yang dikenalkan sebagai “Pergerakan Gabungan kedalam Persekutuan Korporatif Tahan Melayu GEMPAR”. Pada tahun 1947 pergerakan otonomi khusus yang dipimpin oleh Haji Sulung tetapi yang berikan oleh pemerintah Siam dengan deportasi kepulau dan akhirnya di bunuh, setelah kegagalan Haji Sulung dilanjut oleh pergerakan Barisan Revolusi Nasional (BRN) tahun 1960, Patani United Liberation Organization (PULO) tahun 1967, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP) tahun 1977, sebagai wadah pergerakan kemerdekaan Patani dari penjajah Siam (Thailand). Pada tahun 1975 berawal peristiwa pembantaian pertama kali yang dilakukan terhadap para demonstran yang sedang berkumpul di depan Masjid Pusat Patani ada tanggal 29 November 1975 M. Pada tahun 1997 peristiwa pembantaian warga di kampong Dusun Nyo Provinsi Narathiwat dan pembantaian pasukan PULO di kawasan Bukit Budo yang dipimpin oleh Aliyah Tok Bala dan pada tahun 2004

pembantaian di Masjid Kresik di Provinsi Patani, pada tanggal 28 April 2004 dan berlanjut oleh peristiwa pembantaian Takbai Provinsi Narathiwat pada tanggal 25 Oktober 2004 dengan ada korban luku lebih kurang 2000 orang dan 78 yang

tewas, dunia internasional mulai memperhatikan peristiwa pembantaian Takbai baik Amerika Serikat, OIC, Negara ASEAN, UNICEF, dan organisasi regular seperti PP Muhammadiyah, FPI, HASI, JITU, FIPS, KontraS dan lain sebagainya, mengkritik terhadap tindakan PM Takshin Chinawatra yang melakukan kejahatan dalam peristiwa pembantaian Takbai.

2. Peristiwa pembantaian Takbai Provinsi Narathiwat berawal dari Tentara Keamanan Kampong (TKK) 6 orang di tahan oleh aparat polisi Takbai dengan kasus tuduhan TKK ada keterlibatan dalam peristiwa senjata di rampas oleh gerilyawan Patani jumlah 6 laras, pada tanggal 12 Oktober 2004, kemudian TKK di tahan oleh aparat polisi Takbai sejak dari tanggal 12-25 Oktober selama 13 hari di Kantor Polisi Takbai sementara menunggu proses hukum Mahkamah, pada tanggal 25 Oktober para warga korban dan warga masyarakat menuju ke Kantor Polisi Takbai dengan tujuan menuntut keadilan tahanan TKK, setelah itu melakukan reaksi tuntutan kepada aparat polisi supaya membebaskan tahanan TKK tersebut, justru bagi pihak aparat polisi mengabaikan tuntutan para demonstran. Pada sore tanggal 25 Oktober jam 15.00 para demo melakukan aksi besaran sekitar jumlah 2.000 orang dengan berbagai cara mengupaya bebaskan tahanan TKK, setelah itu pihak aparat polisi mengkhawatirkan

pengdemo melakukan suatu acaman bagi pihak polisi, tidak lama suara tembakan senjata polisi dan tentara kearah para demo sehingga sebanyak 1298 korban luka dan 78 orang tewas. Persoalan korban tewas ada perdebatan sengit, pada awalnya televisi media pemerintah mengumumkan jumlah korban hanya tewas sebanyak 6 orang setelah itu televisi BBC mengantakan 78 orang, menurut aktivis HAM

tempatan mengatakan 85 orang tewas, berbedaan jumlah korban menjadi semakin perhatian besar terhadap dunia internasional sehingga timbul persoalan sebenar jumlah yang tewas itu berapa? Dan apa yang terjadi disana?. Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Thailand sewaktu itu dipimpin oleh PM Takshin Chinawatra intuksikan supaya pers berpihak kepada pemerintah dalam mengbaikok data yang realitas, tidak ada lembaga yang di bentukkan oleh pemerintah dalam mengsiasat kasus tersebut dengan kekuasaan yang ada itu tidak sulit jikalau tujuan pemerintah benar-benar mengambilkan perhatian atas kasus tersebut, dan akhir PM Taksin Chinawatra mengumumkan kepada dunia internasional bahwa peristiwa Takbai hanya insiden saja, ini sangat tidak masuk akal oleh karena korban yang tewas itu bukan jumlah yang kecil justru 78 korban tewas dan 1.298 korban luka-luka'

3. Faktor yang mendorong peristiwa pembantaian Takbai 25 Oktober 2004 dengan berbagai sebab pelaku seperti: 1. Faktor pertama aprat tentara AD seringkali kudeta dengan mengguna tentara AD sebagai alat kudeta sejak dari tahun 1932-2006 sebanyak 24 kali kudeta, justru tentara AD seringkali menggunakan kuasa sewenang-wenang dalam penyelesaian konflik, 2. Faktor kedua perbedaan agama, suku bangsa, budaya dan yang menonjol Patani adalah sebuah tanah jajahan Siam sejak dari tahun 1785- sehingga kini, 3. Negara Thailand mengguna sistem demokrasi yang mempunyai raja sebagai kekuasaan tertinggi, oleh karena itu kan mengguna kekuasaan milliter sebagai kekuatan dan mempertahankan karismatik raja.

4. Respon masyarakat Melayu Patani setelah peristiwa pembantaian Takbai 2004, masyarakat, mahasiswa, para intelektual akademisi, para ulama ,tokok politik Islam dan lain sebagainya mulai bergerak dengan membangun ormas-ormas seperti; Persekutuan Mahasiswa SE-Patani (PERMAS) bertujuan menuntut keadilan bagi korban sipil dengan kempe isu HAM sebagai senjata perlawanan. Media yang netral tidak berpihak yaitu Wartawa Patani (WARTANI). Media Deep South Watch (DSW) sebagai media yang berkumpul para akademik intelektual Islam dalam membahas tentang politik nasional dan internasional terutama dalam pertahankan hak asasi mamusia dan sebagainya.

B. SARAN

Dalam peristiwa pembantaian Takbai mengakibatkan konflik, diantara masyarakat Melayu Islam Patani dengan pemerintah Thailand, maka penulis akan mengemukakan saran-saran guna menjadi masukan kepada pihak pemerintah Thailand, saudara serumpun Melayu dan Umat Muslim seluruh dunia, dengan saran-saran tersebut diantara lain:

1. Pemerintah Thailand harus memahami bahwa perbedaan etnis, budaya, agama dan doktrin yang selama ini menjadikan suatu pengolakan konflik antara pemerintah dengan Muslim Patani, itu disebabkan, oleh karena mereka ingin menuntut kembali hak pertuanan bangsa dan negara, umat Islam Patani tidak mau di bawah kezaliman dan penindas pemerintah Thailnd (Siam)
2. Serumpun Melayu harus menyadari bahwa sejarah perjuangan Melayu Muslim Patani ada hubungan akrab dengan melayu Nusantara dalam beberapa peristiwa di

masa sejarah lampau, oleh karena itu, masyarakat Nusantara seharusnya mengambil sikap pro terhadap perjuangan Patani dalam memerdekakan diri dan berdaulat sebagai mana mengikut sejarah pada masa kerajaan Islam Patani pada abad ke-15 yang lalu

3. Umat Islam dunia harus memahami bahwa orang melayu Islam Patani masih di bawah kuasa tirani Siam, yang jauh dari keadilan dan sering memperlakukan kejahatan dan kezaliman terhadap orang Melayu Islam Patani, oleh karena itu, masyarakat dunia Islam harus mengambil sikap yang kontra-Pemerintah Thailand (Siam).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Fathy al Fatani, 1994. Pengantar Sejarah Patani, (Kedah: Perpustakaan Darussalam).
- Atom Van Harskamp (ed). 2005. Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial. Yogyakarta : PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI).
- Arifi Bin Chik, Abdullah Laoman, Suhaimi bin Ismael, Patani Sejarah dan Politik di Alam Melayu, (C.Songkla : Islamic Cultural Foundation of Southern Thailand, 2013),
- Bernard Roho, 2007, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Helmiati, 2011, Sejarah Islam Asia Tenggara, Pekanbaru Riau : Zanafa Publishing.
- Herry Nurdin 2010, Perjuangan Muslim Patani Sejarah Panjang Penindasan dan Citacita Perdamaian, Kuala Lumpur: ALAM RAYA ENTERPRISE SDN BHD.
- Letnan Chualit Yongchaiyuth 2005, The Last War, Bangkok; PT Opsent Pers. .
- Margaret. M. Poloma, 1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mohd Zamberi A. Malek, 1993, Umat Islam Patani Sejarah dan Politik, Kelantan: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Mohd. Zamberi A. Malek, 1994, Patani dalam Tamadun Melay, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Siti Hawa Haji 1992, Hikayah Patani, (Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia, Dudung Abdurrahman, 1999. Metode Penelitian Sejarah, Jakarta : Logos Wancana Ilmu.

Surin Pitsuwan, 1982, Islam di Muangthai Nasiolisme Melayu Masyarakat Patani, Jakarta: LP3ES.

Sumber Majalah

Majalah Sinar SINARAN, Oleh: Abdullah Wan Ahmatgambar: Muhammad bin Yusuh Darani, 12 Januari 2013,

Majalah Tuntutan Nasional (TUNAS) Edisi 01, 2006, oleh Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand).

Majalah Tuntutan Nasional (TUNAS), Edisi 23, 1990, oleh Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand).

Majalah Tuntutan Nasional (TUNAS), Edisi 26, 1994, oleh Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand).

Majalah Tuntutan Nasional (TUNAS), Edisi 01, 2012, oleh Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand).

Majalah Tuntutan Nasional (TUNAS), Edisi 27, 1998, oleh Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand).

Majalah Tuntutan Nasional, Edisi 01, 2014, oleh Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand). Majalah Angkasa, KUDETA –coup d’etat- Gerakan Ilegal Merubut Kekuasaan. Edisi Koleksi, No.XXXVII,2007

Sumber Lisan

Ustazd Hj. Ibrohim Hj. Abdullah,

usia 64 tahun, kepala Madrasah Muassasah Athaqafah Islamiah, Wilayah Patani, 13 Mei 2013

Ustazd Hj. Mohammad Hj. Abdulrahman,

Lelaki, Usai 75 tahan, Kapala Sekolah Tinggi Ma’ahad Ma’arif AlFathoni, Wilayah Patani, 16 Mei 2013

Imam Hj. Abdulrasyid bin Muhammad,

Lelaki, Usia 61 tahun, Imam Masjid Kualakawi, Wilayah Narathiwat, 17 Mei 2013 Kariya Bin Ahmad Musor,

Lelaki, Usia 32 tahun, Setia Usaha Agung Persekutuan Mahasiswa SEPatani (PERMAS), 21 Mei 2013

Sumber Koran

Media Indonesia, 3, April, 2013, “Menurut Mantan Menteri Luar Negeri RI Nur Hassan Wirajuda mengatakan pada Selasa, 3, April, 2013”.

Republika, 28 Mei 2005, “tanggapan konflik di perbatasan Thailand”.

Media Indonesia, 28 November 2004, hlm. 1, “tanggapan PM Takshin Shinawatra dalam sidang ASEAN di Vientiane pada 28-30 November 2004 terhadap peristiwa insiden Takbai”.

Pikiran Rakyat 28 Oktober 2004, hlm. 1 dan 8, “tanggapan dunia internasional terhadap PM Takshin Shinawatra dalam mengambil sikap terhadap peristiwa insiden Takbai”.

Kompas, 7 Februari 2005, hlm. 4, “Usman Hamid, Coordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan authority keamanan Thailand terhadap warga Patani Thailand Selatan”.

Sumber Internet

Uppakon Puengnet. (2004) ISRA Institute Thai Press Development Foundation. [Online]. [Jumat, 18, Desember, 2004]. (<http://www.isranews.org/southnews/documentary/item/28562-pension.html>).

Media Patani, Deep South Watch, [Online]. [Akses: 8 September 2011 pm 11:34]. diperoleh melalui laman Web: <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3676#sthash.czVpYcaS.dpuf>.

Bangkok post: (2008) Keputusan Mahkamah Agung terdapat korban Takbai. [Online]. [Akses: 2013 Januari 2008 at 12:47].diperolehi melalui laman Web: www.bangkokpost.co.th

Kompas, Menurut Direktur Eksekutif Partai Demokrat Surin Pitsuwan (Kompas, 22 Mei 2004) Online]. [Akses: 25 November 2012]. Boleh diperolehi melalui laman <http://ml.scribd.com/doc/50216505/Darah-Tidak-Hagus-Ingatan-Kami-TragediTak-Bai-di-Narathiwat.00615.htm>

Media Patani, Deep South Watch (2013) [Online],[Akses 13 Mac 2013]. Boleh diperolehi melalui Laman Layar: <http://www.deepsouthwatch.org/about>.

Berita Online Malaysia Today. [Online].[Akses; Selasa, 7, Juni, 2006], (http://www.malysiatoday.net/malay/patani/kepala_%20sejara

Berita Online Kapan Lagi. [Online].[Akses;Minggu, 2, Januari, 2005].([http://www.kapanlagi.com /blog/takbai.patani?id=59892](http://www.kapanlagi.com/blog/takbai.patani?id=59892)). Berita Online KontraS. [Online].[Akses;Minggu, 18, Juli, 2005].([http://www.kontras.org /blog/print.php?id=57892](http://www.kontras.org/blog/print.php?id=57892)).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Maerah
NIM : S20173093
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Nurma Maerah
NIM: S20173093

BIODATA PENULIS



Nama : Nurma Maeroh
Nim : S20173093
TTL : Patani, 25 January 1995
Alamat : 26 M.3 T.Sadawa A.Yarang Pattani, Thailand
Jurusan : Hukum Tata Negara
Email : nurma8920@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI/SD Ibul Shool (2007-2011)
2. SMP Mahad Assaqofah Al-islamiah (2011-2014)
3. SMA/SMK Mahad Assaqofah Al-islamiah (2014-2017)
4. UIN KH Achmad Siddiq Jember (2017-2023)